

KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

Dr. Sajidin M, Pd

Dr. Andang Saehu M, Pd

Dr. Asep Sulaeman M, Pd

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

KKN INTERNASIONAL

di Perguruan Tinggi Agama Islam

Dr. Sajidin M, Pd
Dr. Andang Saehu M, Pd
Dr. Asep Sulaeman M, Pd



Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution 105, Cibiru Bandung 081221153371 laman:
<http://bsa.uinsgd.ac.id> dan <http://digital.uinsgd.ac.id> surel: bsa@uinsgd.ac.id

KKN Internasional di Perguruan Tinggi Agama Islam

Penulis: Dr. Sajidin, M.Pd,
Dr. Andang Saehu, M.pd,
Dr. Asep Selaeman, M.Pd.
Penyunting: Dr. Andang Saehu, M.Pd
Tata letak: Iis Sayyidah Nur Azizah
Sampul: Saeful Hamid

Diterbitkan oleh :

Bahasa dan Sastra Arab

Fakultas Adab dan Humaniora
Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A.H. Nasution 105, Cibiru Bandung 081221153371
laman: <http://bsa.uinsgd.ac.id> dan <http://digital.uinsgd.ac.id>
surel: bsa@uinsgd.ac.id

Cetakan I, Oktober 2018
ix + 212 hlm; 17 x 23 cm

ISBN: 978-602-53359-4-5
Hak Cipta dilindungi undang-undang



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi yang atas berkah-Nya Kami bisa menyelesaikan buku ini. Selanjutnya Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shalallahu alaihi wassalam yang telah memberi pedoman dalam melakukan kebajikan-kebajikan.

Buku dengan judul KKN INTERNASIONAL DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM yang ditulis oleh Dr. Sajidin, M.Pd., Dr. Andang Saehu, M.Pd., dan Dr. Asep Sulaiman, M.Pd ini melibatkan berbagai pihak. Oleh karena izinkanlah kami mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Dr. Munir M.A, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang telah memberi kepercayaan untuk melakukan penelitian yang menyokong penulisan buku ini dalam bidang yang dipilih;
2. Bapak Dr. Yudi Wahyu Darmalaksana sebagai ketua Lembaga Pusat Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada Kami untuk mencari data terkait KKN Internasional di beberapa universitas di Indonesia pada bidang ini;
3. Bapak Dr. H. Setia Gumilar selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora dan Bapak Dr, Tedi Priatna, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
4. Prof. Dr. H. Ramdhani M.S. yang telah mengarahkan dan memberikan masukan untuk melakukan penelusuran informasi KKN Internasional ini;



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

vi

5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah berpartisipasi dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam survey tentang KKN. ...ternasional ini; Saudara Hapid Ali S.Pd yang telah membantu dalam translitaterasi hasil wawancara; Tidak lupa kepada Staf LP2M yang telah telaten melayani berbagai kekurangan administratif dalam melakukan penelitian ini. Atas segala kebaikannya semoga Allah SWT memebrian balasan yang setimpal. Terakhir, kami memohon sumbang saran dari pembaca yang budiman untuk perbaikan buku ini.

Bandung, November,
2018

Tim Peneliti



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

vii

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Mengapa Harus KKN Internasional? | 1 |
| 1.2 Masalah Umum KKN Internasional | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat KKN Internasional | 7 |
| BAB II | 9 |
| TINJAUAN TEORITIS | 9 |
| 2.1 Kebijakan KKN di Perguruan Tinggi | 9 |
| 2.2 Program KKN di Lingkungan PTAI | 19 |
| 2.3 Tahapan Pelaksanaan KKN Internasional | 28 |
| 2.4 Tantangan Pelaksanaan KKN Internasional | 34 |
| BAB III | 37 |
| KKN INTERNASIONAL DI PTAI | 37 |
| 3.1 Desain KKN Internasional | 37 |
| 3.2 Langkah-Langkah KKN Internasional | 38 |
| 3.3 Negara Tujuan KKN Internasional | 42 |
| 3.4 Luaran KKN Internasional | 42 |
| 3.5 Simpulan | 43 |
| BAB IV | 45 |
| PELAKSANAAN KKN INTERNASIONAL | 45 |
| 4.1 Realitas Perlunya KKN Internasional bagi Mahasiswa (calon Guru) di Lingkungan PTAI | 45 |



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

viii

| | |
|--|-----|
| 4.2 Pelaksanaan KKN Internasional bagi Mahasiswa Calon Guru di Lingkungan PTAI | 54 |
| 4.3 Pelaksanaan KKN Internasional | 95 |
| BAB V | 114 |
| SIMPULAN DAN SARAN | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |
| BIODATA PENULIS..... | 124 |



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

I

BAB I PENDAHULUAN

Buku ini ditulis sebagai hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan KKN Internasional di berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Penelitian menjadi acuan dengan harapan hasilnya dapat dijadikan rujukan. Bab I menyajikan informasi dasar terkait alasan pelaksanaan KKN Internasional, masalah umum KKN Internasional, tujuan umum KKN Internasional, dan manfaat KKN Internasional. Masing-masing bagian tersebut dibahas secara simultan di bawah ini.

1.1 Mengapa Harus KKN Internasional?

Pelaksanaan program KKN pada umumnya didasari oleh tuntutan *link* (menyambungkan) dan *match* (menyelaraskan) antara lembaga pendidikan dengan dunia nyata di masyarakat. Dalam hal ini KKN mendorong terciptanya kegiatan terintegrasi antara apa yang mahasiswa pelajari di bangku kuliah dengan apa yang masyarakat perlukan terkait dengan bidang pendidikan dan pengabdian. Dalam hal ini, Gunawan (2000) menyebutkan bahwa penyelenggaraan KKN diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran bagi para mahasiswa (peserta KKN) untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

2

Selain itu pelaksanaan program KKN dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menjangkau tiga sasaran utama sebagaimana diungkapkan oleh Perdana, Holilulloh, dan Nurmalisa (2013). *Pertama*, KKN diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi para mahasiswa (peserta KKN) untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. *Kedua*, KKN dapat memberikan nilai positif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. *Ketiga*, KKN merupakan media untuk membangun kemitraan antara lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya sebagai upaya untuk membangun citra sekaligus dapat dijadikan sebagai ajang promosi perguruan tinggi yang bersangkutan. Bahkan dalam hal ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional khususnya yang terkait dengan BAB V Pasal 26 Ayat 4, yang pada intinya berisi rumusan standar kompetensi lulusan perguruan tinggi. Upaya hukum ini bertujuan: “menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemandirian, serta sikap untuk menerapkan ilmu, teknologi, dan seni untuk tujuan kemanusiaan (Astuti et al., 2013: 4).

KKN, termasuk di dalamnya KKN Internasional (*International Service Learning*), telah melembaga dalam dalam



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

3

lembaga pendidikan tinggi. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengungkap dampaknya. Misalnya, Hanks & Grayman (2009) yang meneliti dampak *International Service Learning* terhadap persepsi perubahan kepribadian (*personal change*). Kemudian, Niehaus & Crain (2013) yang meneliti dampak *International Service Learning* terhadap pandangan seseorang terhadap dunia (*world view*). Demikian juga, Pless, Maak, dan Stahl (2011) yang meneliti dampak *International Service Learning* terhadap kompetensi kepemimpinan. Lebih jauh dari itu, penelitian juga sudah mengarah pada upaya mengembangkan model konseptual *International Service Learning*, seperti yang dilakukan oleh Kiely (2005) dan Pechak, dan Thompson (2009). Namun demikian, tidak ada satu pun dari penelitian-penelitian tersebut yang membahas ISL dalam konteks Perguruan Tinggi di Indonesia Indonesia, lebih khusus lagi di Perguruan Tinggi Agama Islam.

Di Indonesia, KKN telah lama dilaksanakan di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.” KKN merupakan salahsatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah menjadi tuntutan kurikulum selain



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

4

untuk menjalin ikatan silaturahmi antara sesama umat Islam. Karena merupakan tuntutan kurikulum, sudah dapat dipastikan bahwa seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama melaksanakan KKN. Jika kawasan pengabdian dan pengajarannya diperluas ke mancanegara, maka kegiatan ini diberi nama KKN Internasional. Untuk jenis KKN seperti ini sejumlah perguruan tinggi di tanah air. Tercatat, misalnya IAIN Tulungagung dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan dua PTAI lainnya yang melaksanakan KKN di Malaysia, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sayangnya, walaupun secara legal formal KKN Internasional sudah melembaga di PTAI tersebut dengan terjalannya kerjasama (*MoU*) antara lembaga-lembaga ini dengan lembaga pendidikan di luar negeri, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang KKN Internasional ini. Sementara itu kebutuhan KKN Internasional semakin terasa sehubungan dengan tuntutan internasionalisasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi diwajibkan menggalang kerjasama dengan komunitas global, yakni lembaga, organisasi, dan masyarakat mancanegara. Sebagai bentuk dari kerjasama, KKN Internasional mempunyai nilai strategis. Oleh karenanya program ini menemukan momentumnya pada saat ini.

Atas dasar pemikiran diperlukan pengembangan sebuah model KKN Internasional berbasis penelitian dan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

5

pengembangan (*Research and Development*) yang secara khusus memberikan pedoman bagi pelaksanaan KKN Internasional di seluruh PTAI di Indonesia. Sehingga gambaran mengenai prosedur, pelaksanaan, proses monitoring, dan evaluasi KKN Internasional dapat terformulasikan dengan baik oleh PTAI.

1.2 Masalah Umum KKN Internasional

Penelitian diawali dengan melihat keefektifan KKN Internasional yang ada dan melakukan analisa kebutuhan (*need assessment*) dari pihak *stake holder* maupun pengguna (*user*). Penelitian dilanjutkan dengan mengembangkan prototipe dan studi kelayakannya. Terakhir, penelitian akan melihat keefektifan model yang baru dengan melakukan uji coba lapangan.

Dengan merujuk pada paradigma penelitian dan pengembangan, masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1.2.1 Tahap Eksplorasi

- a. Bagaimana pelaksanaan KKN Internasional untuk mahasiswa calon guru dilaksanan di lingkungan PTAI selama ini?
- b. Sejauh mana keefektifan pelaksanaan KKN Internasional dilihat dari respons *stake holder* maupun *user*?

1.2.2 Tahap Pengembangan

- a. Bagaimana prototipe model KKN internasional untuk mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI?
- b. Bagaimana kelayakan model KKN internasional untuk mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI?
- c. Bagaimana model KKN Internasional untuk mahasiswa calon guru yang dibutuhkan oleh pengguna dan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*?

1.2.3 Tahap Uji Coba

Tahap uji coba dirumuskan dengan pertanyaan tunggal: Seberapa jauh keefektifan model KKN Internasional untuk mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan akhir dari penelitian ini mendapatkan rumusan model KKN Internasional untuk mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI. Dengan mengikuti pola penelitian di atas, masing-masing tahapan penelitian merinci tujuan-tujuan berikut:

1.3.1 Tahap Eksplorasi

- a. Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan KKN Internasional bagi mahasiswa calon guru di lingkungan.
- b. Untuk mengeksplorasi keefektifan pelaksanaan KKN Internasional dilihat dari respons *stakeholder* maupun *user*.

1.3.2 Tahap Pengembangan

- a. Untuk mengidentifikasi prototipe model KKN Internasional mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI.
- b. Untuk menganalisa kelayakan model KKN Internasional mahasiswa calon guru di lingkungan PTAI berdasarkan pendapat para pakar dan uji coba lapangan.
- c. Untuk mengembangkan model KKN Internasional mahasiswa calon guru yang dibutuhkan oleh pengguna dan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*.

1.3.3 Tahap Uji Coba

Pada tahap akhir, setelah melalui proses uji coba, penelitian dapat menghasilkan model KKN Internasional mahasiswa calon guru yang efektif untuk diterapkan di lingkungan PTAI.

1.4 Manfaat KKN Internasional

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada berbagai pihak, terutama perguruan tinggi di lingkungan PTAI di tanah air, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, munculnya model ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi stimulan bagi peneliti lain untuk terus melakukan perbaikan atau menciptakan sendiri model yang lebih efektif. Munculnya model yang lebih baik atau munculnya model baru yang lebih variatif memungkinkan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

8

lembaga pendidikan mengambil model KKN Internasional yang lebih cocok dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing.

Secara praktis, model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi informasi berbasis data (data-based information) atau pedoman atau acuan dalam melaksanakan KKN Internasional bagi perguruan tinggi di lingkungan PTAI. Selain itu, model inipun diharapkan bisa memberi gambaran bagi *stake holder* dan *user* mengenai tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan yang sebaiknya dilakukan dalam melakukan KKN Internasional.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Bab II merupakan salah satu Bab yang menopang jalannya laporan penelitian ini. Melalui Bab II inilah analisis terhadap data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam. Oleh karena itu, Bab II ini meliputi Kebijakan KKN di Perguruan Tinggi, Tujuan KKN, dan Jenis-Jenis KKN di Perguruan Tinggi, langkah-langkah pelaksanaan dan tantangan KKN Internasional. Berikut adalah beberapa penjelasannya.

2.1 Kebijakan KKN di Perguruan Tinggi

2.1.1 KKN: Pengertian dan Ruang Lingkup

Kuliah Kerja Nyata atau lebih populer disebut KKN merupakan salah satu rangkaian kegiatan akademik di setiap universitas baik negeri maupun swasta yang dilakukan oleh dosen sebagai pembimbing KKN dan mahasiswa sebagai peserta KKN. Istilah KKN ini sudah mengakar sejak pertama kali dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh masing-masing universitas. Namun istilah ini tampaknya menjadi perbincangan hangat ketika dipadankan ke dalam bahasa Inggris. Beberapa mengistilahkan KKN sebagai *community service* dan beberapa lagi menyerbutnya sebagai *service learning*. Ditengah-tengah perbedaan istilah tersebut, Burns (1998) menegaskan bahwa



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

10

“teachers, school administrators, parents and business leaders, based on their familiarity with community and public service, typically assume that community service and service learning have the same meaning.” Cukup jelas pernyataan Burns tersebut bahwa **tidak ada** perbedaan antara *community service* dan *service learning* dilihat dari popularitas makna kedua istilah tersebut bagi para praktisi KKN.

Bahkan, Crabtree (2008) tidak hanya melihat *service learning* dan *community service* sebagai dua program yang sama melainkan juga mengintegrasikan pengajaran (*academic instruction*) dan pengabdian kepada masyarakat (*community service*) dalam satu bingkai yang disebut *International service learning*. Lebih lanjut, Crabtree (2008:18) yang didukung oleh Berry & Chisholm (1999) dan Harman & Roberts (2000) menyebutkan bahwa tujuan penggabungan *community service* dengan *learning service* yaitu “to increase participants’ global awareness and development of human values, build cultural understanding and communication, and enhance civic mindedness and leadership skill.

Meskipun tampak sama dilihat dari definisi antara *community service* dan *service learning*, dilihat dari pelaksanaannya, Burn (1998) lebih lanjut membedakan keduanya. Menurutnya *community service* merupakan layanan umum yang dilakukan oleh individu bagi kemasalahatan orang lain, organisasi,



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

II

dan atau komunitas. Sedangkan *learning service*, menurutnya, merupakan “*a method in which students learn and develop through active participation in organized community service experiences that meet actual community needs.*” Dengan demikian, *community service* merupakan kendaraan yang dijalankan oleh bahan bakar (metode *service learning*). Perbedaan keduanya tersebut didukung Ziegert & McGorldrick (2004) bahwa “*more recent increases in volume and attention to rigor in research have led some educators to conclude that the service learning field is at a “methodological crossroads.”*”

Akan tetapi, Kiely (2005) tampaknya tidak sefaham dengan Burn (1998) dan Ziegert & McGorldrick (2004) tentang nosi bahwa *service learning* merupakan metode atau bagian dari *community service*. Bahkan Kiely (2005:7) memberikan ilustrasi terhadap penerapan program *service-learning*. Menurutya, lebih dari satu dekade, sebuah komunitas kampus mahasiswa *undergraduate* di New York berkesempatan untuk berpartisipasi dalam program *service learning* di Puerto Cabezas, Nicaragua. Lebih tepatnya dari 1994 - 2005, tujuh kelompok secara terpisah dengan jumlah 57 peserta yang terdiri dari mahasiswa tahun kedua dan keempat berpartisipasi dalam program tersebut. Program tersebut mengharuskan peserta untuk berpartisipasi dalam Enam SKS kehadiran di presentasi seminar tentang budaya, sejarah, dan bahasa Nicaraguan.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

12

Selain itu, mereka juga diwajibkan melakukan penelitian tentang permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat Nicaraguan, menyusun dan melakukan workshop tentang kesehatan, dan terjun langsung dirumah sakit setempat. Adapun, metode yang dilakukan dalam melaksanakan *service learning* oleh para mahasiswa tersebut, menurut Kiely, yaitu *asset-based approach to community development* yang diajukan oleh Korten (1990) dan Kretzmen & McKnight (1993), *community-based health approach* yang diajukan oleh Werner (1999), dan *participatory action research approach* yang diajukan oleh Bringle & Hatcher (2000).

Dari ilustrasi di atas, cukup jelas kiranya bahwa *service learning* merupakan salah satu istilah yang posisinya sejajar dengan *community service*. Yang menjadi titik berat keduanya yaitu siapa yang melakukan program tersebut: *community service* dapat dilakukan tidak hanya oleh individu dan sekelompok mahasiswa dengan berbagai program study atau *department*, tetapi juga oleh organisasi masyarakat (NGO) atau organisasi pemerintahan. Akan tetapi *service learning* cenderung hanya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari program studi tertentu untuk tujuan tertentu. Seperti ilustrasi yang diulas di atas menunjukkan bahwa program *service learning* dilakukan oleh mahasiswa kesehatan atau kedokteran. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pada konteks penelitian ini *service learning*



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

13

digunakan oleh program studi yang bergerak di bidang keguruan (*tarbiyah*).

Tinjauan definisi *service learning* ini dibahas lebih detail oleh Celia, Pechak, & Thompson (2009) dengan membaginya menjadi *international service*, *international learning*, dan *international service leaning*. Pembagian ini didasarkan pada kebutuhan masing-masing komunitas kampus penyedia layanan. Dalam hal ini, kampus di lingkungan Perguruan Tinggi Islam sudah banyak yang menyelenggarakan *international service learning*. Definisi yang dibahas oleh Celia, dkk (2009) memperkuat pendapat para ahli sebelumnya bahwa *service learning is a structured learning experience that combines community service with explicit learning objectives, preparation, and reflection*. Kemudian, jika disesuaikan dengan kebutuhan internasional, mereka mendefinisikan *international service learning* menjadi sebuah kesempatan layanan pembelajaran yang dilakukan di luar negeri, tempat program tersebut dilakukan. Program-program atau ruang lingkup yang dilakukan dalam *international service learning* yaitu *international service* dan *international learning*.

Fokus kegiatan *International service*, menurut Celia, dkk (2009), meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan yang ditawarkan oleh fakultas atau program studi kepada masyarakat negara sasaran yang bersifat layanan kemasyarakatan, seperti layanan kesehatan, terafi atau konsultasi pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

14

fokus kegiatan *international learning* yaitu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya oleh pihak fakultas atau program studi untuk ditawarkan ke lembaga pendidikan di negara tujuan. Kedua jenis cakupan kegiatan ini berada dalam payung yang bernama *international service learning*.

Baik *service learning* maupun *international service learning* keduanya memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan putra putri bangsa yang sedang mengenyam pendidikan di berbagai universitas di seluruh dunia. Terkait hal ini, Hartman dan Rola (2000) menyebutkan bahwa *service learning* telah mampu membantu para mahasiswa meningkatkan kemampuan pemahaman mereka tentang diri mereka (kepribadian), lingkungan, kependudukan, kepemimpinan, dan ragam perbedaan. *International service learning* juga telah membantu menambah wawasan mahasiswa tentang pengalaman hidup dengan budaya asing, silang komunikasi, dan beragamnya perkembangan sistem bahasa.

2.1.2 Tujuan KKN

KKN merupakan salah satu program pendidikan di Universitas Islam Sunan Gunung Djati (UIN SGD) yang merupakan realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. KKN dinyatakan sebagai



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

15

mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa UIN SGD jenjang Strata 1 berdasarkan Surat Keputusan Rektor bahwa KKN juga dipandang perlu dan penting karena memiliki muatan pengabdian masyarakat bagi seluruh mahasiswa UIN SGD.

Selain itu, KKN merupakan suatu bagian dharma pengabdian kepada masyarakat. Dharma pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tiga tanggungjawab Perguruan Tinggi yang dikenal dengan 'Tri Dharma Perguruan Tinggi,' yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan dan pengajaran diperoleh pemahaman mengenai konsep-konsep, teori-teori yang relevan dengan bidang studinya. Melalui penelitian akan ditemukan pengembangan konsep-konsep dan teori-teori sebagai bagian dari kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pengembangan teori tersebut kemudian diaplikasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang merupakan inti dari pengabdian masyarakat.

Jika disandingkan dengan misi UIN SGD yaitu, maka KKN Internasional dapat merupakan satu dari banyak cara untuk mencapai visi misi tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Niehaus & Crain (2013:31) bahwa "*International service-learning is an increasingly popular way to bridge the internationalization and civic engagement goals of colleges and universities.*" Cukup jelas bahwa KKN Internasional dapat menjadi salah satu cara terwujudnya internasionalisasi kampus, khususnya bagi UIN SGD.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

16

Tujuan KKN pada dasarnya bervariasi tergantung universitas atau institusi masing-masing. Sebagai contoh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dalam buku pedoman KKN 2017-2018, melaksanakan KKN Internasional dengan tujuan: 1) agar lembaga pendidikan tinggi menghasilkan sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati dan menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara pragmatis; 2) untuk mendekatkan lembaga pendidikan tinggi dengan masyarakat dan menyesuaikan kurikulum pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan masyarakat; 3) membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan; dan 4) mampu mengembangkan kerjasama mahasiswa antar berbagai disiplin ilmu dengan masyarakat.

Di lain lembaga pendidikan, misalnya di IAIN Tulung Agung yang memadukan KKN dengan KKN Internasional, berdasarkan buku pedoman KKN-KKN Internasional Terpadu, mereka memiliki tujuan pelaksanaan KKN Internasional dengan membaginya menjadi dua tujuan besar yaitu 1) Tujuan Umum dan 2) Tujuan Khusus. Tujuan umum dari kegiatan KKN Internasional yaitu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam rangka mengembangkan kelembagaan ke arah *world class institute* melalui *islamic studies* dan *cross culture studies* yang berdaya saing. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

17

KKN Internasional di IAIN Tulungagung meliputi: a) menggali potensi mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan wawasan keilmuan; b) menggali perkembangan *Islamic Studies*, sosial, dan budaya lokal di negara tempat kegiatan KKN-KKN terpadu; c) melatih kompetensi diri dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa di bidang pengajaran dan PkM; d) mempercepat perkembangan kelembagaan menuju *world class institute* dan meningkatkan kemampuan SDM sesuai dengan tuntutan dinamika perkebangan IPTEK; e) mempercepat upaya pembangunan masyarakat ke arah terciptanya masyarakat dinamis dan siap menempuh perubahan perilaku dan pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang lebih baik; f) mengembangkan potensi mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan inovasi dalam profesi pekerjaan sosial, khususnya dalam membangun masyarakat madani; g) mengembangkan potensi mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya ke arah peningkatan kemampuan profesinya yang dilaksanakan secara mandiri atau kelompok; dan h) meningkatkan, memperluas, dan memantapkan sikap etis profesionalisme dan nasionalisme yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidangnya.

Selain itu, UIN Sunan Ampel yang juga telah melaksanakan KKN Internasional mendasarkan pelaksanaannya pada tujuan berikut ini: 1) Tujuan Umum dan 2) Tujuan Khusus. Tujuan umum dai KKN Internasional yaitu meningkatkan kualitas peran



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

18

UIN Sunan Ampel dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat melalui pendampingan dalam rangka mewujudkan masyarakat transformatif menuju kehidupan masyarakat kritis yang agamis, berkeadilan, mandiri, dan demokratis. Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan KKN Internasional yaitu: a) meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab sosial mahasiswa dan civitas akademika terhadap kehidupan masyarakat; b) meningkatkan *kualitas intelektual* mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu sebagai bekal untuk memberdayakan masyarakat; c) menjadikan mahasiswa mampu belajar bersama masyarakat untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari kehidupan nyata di masyarakat; d) mempertajam kepekaan, empati, simpati, dan kepedulian sosial mahasiswa terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat; e) menjadikan mahasiswa memiliki sikap tanggap aksi dalam menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat; f) memperkuat integrasi mahasiswa dengan masyarakat melalui partisipasi aktif bersama masyarakat dalam mengurai dan memecahkan masalah-masalah bersama masyarakat; g) membekali mahasiswa dengan beragam metode dan teknik sebagai sarana untuk menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat; h) mensinergikan potensi keilmuan yang diperoleh mahasiswa selama di kampus dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam rangka memecahkan masalah sosial;

dan i) merubah paradigma pembinaan dan penyuluhan menjadi paradigma partisipatori dan transformatif dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kandungan tujuan KKN Internasional di atas sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh para ahli seperti Elble (2009); Ferrence & Bell (2004); Jacoby (2009); Kiely (2004); King (2006); Lewis & Niesenbaum (2005); Marmon (2007); Pagano (2003); dan Pisano (2007) bahwa “*international service learning is preserved to students to get an equivalent cross-cultural experience within the United States.* (Jacoby, 2009; Marmon, 2007). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KKN Internasional diperuntukkan bagi mahasiswa agar memperoleh pengalaan lintas dan silang budaya sebagai salah satu bekal menjalani hidup bersosial yang beragam di masa yang akan datang.

2.2 Program KKN di Lingkungan PTAI

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan berbasis lapangan dengan cara memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa untuk terjun ditengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung megajarkan kepada mahasiswa cara meidentifikasi dan cara mengatasi (*problem solver*) masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kuliah kerja nyata secara langsung akan menunjukan keterkaitan langsung antara dunia pendidikan dan upaya



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

20

perwujudan kesejahteraan masyarakat. Fida (1997:1) menyatakan bahwa “KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh mahasiswannya di bawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintah daerah”. Pengertian pengabdian kepada masyarakat ialah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara ilmiah dan melembaga langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia menuju tercapainya manusia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Menurut Gunawan (2000), kegiatan KKN pada dasarnya merupakan kegiatan interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak. Terdapat tiga pola atau bentuk interaksi sosial, yaitu : (1) interaksi antar orang perorangan; (2) interaksi antara orang dan kelompoknya, dan sebaliknya; dan (3) Interaksi antar kelompok. Penyelenggaraan KKN diharapkan dapat menjangkau tiga sasaran utama. Pertama, sebagai wahana pembelajaran bagi para mahasiswa (peserta KKN) untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kedua, Kuliah Kerja Nyata dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, Kuliah Kerja Nyata merupakan media untuk membangun kemitraan antara lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

21

dengan masyarakat, termasuk di dalamnya sebagai upaya untuk membangun citra sekaligus.

KKN pada dasarnya merupakan bentuk lain dari *service learning*. Menurut Furco (1996) *service learning* memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) fokus kegiatannya adalah memberikan layanan secara sukarela (*service*) dan belajar (*learning*), (2) orientasinya pada pengembangan akademik dan hidup bermasyarakat, (3) bersifat terintegrasi dengan kurikulum (lihat juga, Koliba, Campbell, & Shapiro, 2006, dalam Zhang, et al., 2008,) dan (4) berbasis disiplin ilmu yang digeluti mahasiswa. Lebih jauh Crabtree (2008) menegaskan bahwa *service learning* merupakan kombinasi antara pembelajaran akademik (*academic instruction*) dan layanan berbasis masyarakat (*community-based service*). Meskipun secara harfiah, KKN lebih dekat dengan *community service program*, dalam pelaksanaannya KKN bukan sekedar memberikan layanan saja tetapi ada keterlibatan mahasiswa dalam penyerapan dan transformasi ilmu dari dan terhadap masyarakat. Demikian juga, KKN bukan magang (*internship*) yang semata-mata untuk peningkatan karir mahasiswa. Diakui bahwa *service learning* memberi dampak positif bagi mahasiswa, diantaranya meningkatkannya rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kecakapan hidup (Astin at al., 2000; Shelley, 2000; Hartman and Gola, 2011; Furco and Root, 2010;). Jika kegiatan ini dilakukan di negara yang berbeda tempat

mahasiswa itu berada maka dinamai *International Service Learning (ISL)*.

2.2.1 Jenis-Jenis KKN di Perguruan Tinggi

Pada dasarnya terdapat dua jenis KKN di perguruan tinggi yaitu KKN Konvensional dan KKN Transformatif. Maksud dari jenis KKN yang pertama yaitu kentalnya paradigma 'positivistik' dalam melaksanakan KKN. Nalar KKN positivistik selalu menggunakan pola berfikir deduktif, bahwa problem-problem masyarakat bisa dilihat dan dipecahkan berdasarkan nalar akademik-teoritik tanpa harus mempelajari dan mendalami masalah tersebut. Paradigma KKN konvensional atau positivistik selalu berasumsi bahwa masyarakat adalah suatu objek yang lemah dan tidak memiliki daya apa-apa, sementara mahasiswa adalah subjek yang powerful yang dianggap bisa (dengan segala teorinya) memecahkan masalah-masalah masyarakat secara instan dengan menggunakan model *top-down*. Ciri khas dari KKN Konvensional atau positivistik ini yaitu munculnya beragam program yang disebut muatan institut, universitas, dan muatan fakultas yang dituangkan dalam buku pedoman KKN pada masing-masing universitas atau institusi. Ketika di lapangan, hampir semua program yang dibuat oleh mahasiswa diambil dari tawaran program tertuang dalam buku panduan, bukan didasarkan pada kebutuhan mendasar masyarakat atau berdasarkan proses kajian



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

23

yang mendalam terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, program bukan berdasarkan 'kemauan' masyarakat, melainkan 'kemauan' mahasiswa.

Gambaran tentang pelaksanaan KKN Konvensional ini dapat dilihat dalam Panduan Penyelenggaraan KKN di UIN Sunan Ampel. Pada tahun 1975/1976 untuk pertama kalinya UIN Sunan Ampel (saat itu masih IAIN Sunan Ampel) melaksanakan KKN dengan pilot project, dan dari pilot project ini kemudian diberlakukan secara menyeluruh di semua fakultas. Pada tahun 1980-an, UIN Sunan Ampel memberlakukan KKN Terpadu, yakni pada daerah tertentu ditempati oleh mahasiswa dari semua fakultas dengan konsentrasi di wilayah pedesaan. Pada tahun 1990-an, pola ini diganti dengan konsentrasi satu fakultas satu wilayah, misalnya Fakultas Adab hanya konsentrasi di Kabupaten Probolinggo, Fakultas Ushuluddin di Bojonegoro, demikian pula fakultas yang lain. Satu hal yang sama dari tahun ke tahun pelaksanaan KKN itu yaitu para mahasiswa menawarkan program yang sudah dirancang dalam buku pedoman KKN, bukan melakukan program berbasis *need analysis*.

Bahkan, di kampus tercinta kita, UIN Sunan Gunung Djati (sebelumnya IAIN), menurut pengalaman penulis KKN yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya (hingga 2013an) masih melakukan KKN Konvensional. Hal ini terbukti ketika setiap kelompok KKN diwajibkan membuat serangkaian kegiatan yang



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

24

akan dilakukan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dirancang misalnya pengajian rutin, kerja bakti, perayaan maulidan, perayaan 17 agustus, pengajaran sekali dua kali di sekolah-sekolah, pengajaran sekolah diniyah, perlombaan-perlombaan, dsb. Dengan kata lain, haruskah KKN itu seperti itu? Melakukan apa yang sudah dirancang sebelumnya oleh mahasiswa berdasarkan pada rujukan yang dibuat oleh universitas, institusi, atau fakultas? Oleh karena itu mulailah bermunculan gagasan-gagasan tentang pilihan paradigma yang harus diambil oleh setiap universitas atau institusi agar KKN yang dilakukan sebelumnya mengalami transformatif atau perubahan. Di UIN Sunan Ampel, sejak 2005 sudah melakukan transformasi KKN dari KKN Konvensional menjadi KKN berbasis riset yang disebut KKN Transformatif dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), sejak 2017 mulai melaksanakan KKN yang disebut KKN Reguler berbasis survei dan KKN Untuk Negeri. Sedangkan di UIN Sunan Gunung Djati sejak 2014 pelaksanaan KKN .

Gagasan-gagasan atau paradigma baru yang dioperasikan oleh beberapa universitas atau institusi di lingkungan PTAI menunjukkan jenis KKN berikutnya yaitu KKN Transformatif. UIN Sunan Ampel melalui LPM memperkenalkan KKN berbasis PAR mulai dari 2005 hingga 2013. Melalui KKN PAR ini, masyarakat memiliki peran dalam menentukan masalahnya, merumuskan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

25

masalah yang dihadapi, merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan, sementara mahasiswa sebagai pendorong, fasilitator, katalisator dan pendamping masyarakat dalam merumuskan dan memecahkan masalah-masalahnya. Dari sisi terminologi, ada tiga variabel yang menjadi ciri KKN PAR yakni 'research, action, dan participatory.' Pertama, bahwa KKN PAR diawali dengan penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, setelah diketahui permasalahannya kemudian berlanjut pada pencarian alternatif jalan keluar, dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk item-item program (*action*). Ketiga, baik dalam riset maupun melaksanakan program dilaksanakan secara partisipatif, yakni melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk merumuskan permasalahannya dan kemudian merencanakan jalan keluar persoalan-persoalan yang dihadapi.

KKN Reguler merupakan jenis KKN yang diselenggarakan oleh LPPM UMP secara rutin setiap tahun akademik berjalan. Tujuan KKN Reguler adalah melatih kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengembangkan potensi daerah masyarakat pedesaan (Batool, 2012). Dikatakan berbasis survei karena sebelum diterjunkan ke lapangan, mahasiswa peserta KKN diwajibkan melakukan survei ke lapangan mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan potensi wilayah pedesaan serta menyusun rencana kegiatan KKN



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

26

berdasarkan hasil survei tersebut. Selain itu pada tahun yang sama juga UMP melaksanakan KKN untuk Negei (KKN-Mu) yang merupakan KKN gabungan antara beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebagai contoh, jaringan UMP bergabung melaksanakan KKN-Mu di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama membangun desa dan membantu masyarakat setempat mengembangkan taraf sosial dan ekonominya.

Jenis KKN pun kemudian berkembang menjadi KKN (Terpadu) Internasional. KKN Terpadu Internasional ini merupakan pelaksanaan KKN yang digabung dengan KKN di negara tujuan. Seperti halnya yang sedang dilakukan oleh IAIN Tulungagung. Program KKN-KKN Terpadu diselenggarakan IAIN Tulungagung 1 tahun 2 kali yang dimulai pada tahun 2014 sampai sekarang. Pelaksanaannya yaitu di Thailand, tepatnya di wilayah Pattani, Narathiwat, Songla, Yala dan Phuket. KKN-KKN Terpadu merupakan suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Keterpaduan kegiatan KKN-KKN ini berupa keterpaduan aspek manajemen dan waktu (Astuti, 2012). Tujuan yang ingin dicapai KKN-KKN adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru yang



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

27

profesional, memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah/madrasah dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan dan keahlian sesuai bidangnya, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkna ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai ke dalam kehidupan nyata di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan latar belakang keilmuan.

Sedangkan jenis KKN Internasional yang tidak memadukannya dengan program KKN sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. KKN Internasional yang diselenggarakan oleh UM Purwokerto merupakan bentuk kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Universitas Teknologi Malaysia (UTM). Pelaksanaannya yaitu bersama-sama dengan peserta dari UTM membangun masyarakat did aerah Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia. Peran dosen pembimbing lapangan (DPL) sangat menentukan pada KKN Internasional. Melalui bimbingan DPL, mahasiswa dapat membantu dan memotivasi masyarakat dan pemuda untuk mengembangkan potensi wilayah di negara tujuan sehingga terwujud generasi muda yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, kegiatan KKN Internasional dapat menjadi aktualisasi sasaran pendidikan non-formal yang berdaya guna dan berhasil guna.

Gambaran jenis-jenis KKN di atas lebih kurangnya sejalan dengan jenis-jenis KKN yang diungkapkan oleh Niehaus & Riverra (2013) bahwa:

“International Service Learning programs can take a variety of forms, including single courses that take place entirely in host-country (often 6-8 weeks in length), sandwich programs involving a shorter time in a foreign country within an on-campus academic course before and/or after the ISL experience (which may or may not also include a domestic service-learning experience), international practicum or internship experiences, or co-curricular programs such as alternative Breaks that, while not credit-bearing experiences, often include structured reflection and learning.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program KKN Internasional dapat dilaksanakan dengan berbagai cara: program *host-country* yang bisa tinggal selama 6-8 minggu, program *short-course* di luar negeri, dan program praktikum atau magang.

2.3 Tahapan Pelaksanaan KKN Internasional

Sebuah kegiatan yang baik memerlukan langkah-langkah yang teratur dan tersistematisasi dengan baik. Di dalamnya ada sejumlah kegiatan yang penting tersusun dengan jelas mana yang pertama dan mana yang terakhir. Disamping itu langkah-langkah yang dilaksanakan harus berbasiskan penelitian atau rekomendasi dari kajian lapangan.

Para ahli berselisih pendapat apa yang harus dilaksanakan pada tiap tahap-tahap itu. Akan tetapi secara umum langkah-langkah pelaksanaan KKN Internasional dan dibagi ke dalam tiga tahap: pra pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pasca pelaksanaan.

2.3.1 Pra Pelaksanaan

Tahap ini adalah semua kegiatan persiapan sebelum kegiatan KKN Internasional di lapangan sampai menjelang keberangkatan ke lapangan. Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan adalah:

- a. Mengadakan komunikasi dengan pihak -pihak yang akan menerima layanan KKN Internasional yang ada di negara tujuan. Komunikasi dimaksudkan untuk membicarakan tentang berbagai hal, antara lain: kesiapan dari pihak penerima layanan, lama pelaksanaan, jumlah peserta, layanan yang diberikan, akomodasi, dan teknik pelaksanaan. Jika hasil komunikasi itu diformalkan maka isinya menjadi MoU (*Memorandum of Understanding*), yakni nota kesepahman antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Memahami bentuk atau jenis layanan yang diperlukan dengan melakukan *need assessment* lapangan. Need assessment dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: wawancara, observasi lapangan, penyebaran angket, studi



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

30

dokumentasi, atau gabungan dari semuanya. Data dari need assessment dapat menjadi bahan dalam untuk merumuskan tujuan KKN internasional dan bahan dalam orientasi atau pengenalan KKN Internasional.

- c. Menetapkan kriteria dan syarat-syarat keikutsertaan KKN Internasional dan penyebaran informasi lewat berbagai media yang ada. Dalam era digital sekarang ini penyebaran lewat media internet lebih efektif daripada penyebaran media lewat media cetak. Penggunaan *social media* (twitter, facebook, atau Instagram) lebih efektif dari pada menggunakan brosur atau *flyer*. Namun demikian penggabungan keduanya menjadi sangat penting untuk mendapatkan peserta yang lebih memenuhi syarat.
- d. Melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Materi seleksi umumnya terdiri dari penguasaan bahasa asing, motivasi keberangkatan, pengetahuan tentang seni atau budaya lokal atau luar. Keterampilan mengajar merupakan materi seleksi yang sering diberikan untuk negara-negara tertentu dimana yang menjadi sasarannya adalah pelajar atau sekolah-sekolah.
- e. Melakukan orientasi atau pelatihan terhadap *skills* (keterampilan) yang dibutuhkan di lapangan. Sebagaimana ahli menyatakan bahwa materi orientasi dapat meliputi apa saja

termasuk keadaan geografis, keadaan ekonomi, keadaan budaya, dan bahasa negara sasaran.

- f. Pemeriksaan kesiapan pemberangkatan yang dilakukan oleh panitia atau masing-masing peserta. Daftar senari (*list*) jenis barang yang diperlukan dapat membantu mengidentifikasi barang-barang apa saja yang sudah terpenuhi atau sudah lengkap.

2.3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini sering disebut dengan *In-Country Activities* (lihat Baker-Boosamra, 2006). Inti dari kegiatan dalam tahap ini adalah memberikan layanan sesuai dengan masyarakat sasaran, monitoring dari stakeholder, refleksi kegiatan, dan konsolidasi dengan berbagai pihak di negara sasaran.

Secara spesifik Baker-Boosamra, (2006) merinci kegiatan ini kadalam beberapa aktifitas sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan masyarakat setempat segera setelah kedatangannya. Agendanya memperkenalkan mahasiswa dengan masyarakat tersebut dan menjelaskan alasan kedatangannya;
- b. Berbaur (*immersed*) dengan warga dan melakukan dialog dengannya;
- c. Penempatan peserta di lokasi tempat melakukan layanan (*service placements*), dan;

- d. Mengadakan pertemuan akhir yang dihadiri oleh para peserta dan perwakilan dari masyarakat dan lembaga (sebuah wadah untuk melakukan evaluasi dan forum bertukar proyek sosial dan memberikan rekomendasi).

2.3.3 Pasca Pelaksanaan

Tahap ini merupakan serangkaian kegiatan akhir dari sebuah program. Di dalamnya meliputi kegiatan refleksi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang disarankan oleh para peneliti setelah mereka meninggalkan negara tujuannya: melakukan *debriefing* (Schreier & Prügl, 2011), evaluasi dan penguatan (*enhancement*) (Pechak & Thompson, 2009), dan aktifitas tindak lanjut (*follow up activities*) (Baker-Boosamra, 2006).

Debriefing nampaknya merupakan kegiatan yang sangat penting pada tahap ini dimana kegiatan ini merupakan media untuk evaluasi dan refleksi (pengambilan pelajaran dari sebuah kegiatan). Agar kegiatan ini berjalan efektif, semua peserta harus diberi kesempatan mengemukakan pendapat atas pengalamannya. Demikian juga, fasilitator hendaknya secara cermat menganalisa pendapat tersebut untuk kemudian dijadikan catatan atau rekomendasi untuk kegiatan berikutnya. Penguatan (*enhancement*) dilakukan berdasarkan data dari evaluasi. Penguatan ini merupakan bagian dari kegiatan tindak lanjut untuk



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

33

membantu peserta memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan.

Membangun program yang terus berkelanjutan sangat disarankan pada tahap ini. Wros and Archer (2010) menyarankan agar perguruan tinggi berkolaborasi dengan organisasi setempat untuk terjadinya hubungan yang berkelanjutan di negara tujuan. Baker-Boosamra, (2006) menyebut kegiatan sebagai: “*Establish a means of on-going communication with counterparts in host countries,*” yakni membangun sarana komunikasi yang terus menerus dengan mitra di negara tujuan.

Pada level makro Burn (1998) mencoba mengembangkan langkah-langkah rinci dalam pelaksanaan *International Service Learning* (identik dengan KKN Internasional). Langkah-langkah tersebut terbagi kedalam tiga tahapan utama: (1) persiapan, (2) pelaksanaan (*accomplishment*), dan (3) penilaian akhir. Sedangkan, Berasategi, Alonso, & Roman, (2016) membagi tahap ini lebih rinci lagi, yang meliputi: a) diagnosis of the organizations and groups which are object of the intervention; b) searching bibliography about experiences carried out in similar context; c) designing a socio-educational intervention; d) implementation of this socio-educational intervention. Adapun, Pechak & Thompson, (2009) mengajukan lima langkah dalam pelaksanaan kegiatan service learning agar bisa optimal. Langkah tersebut meliputi:

pengembangan rancangan (*design*), pelaksanaan, evaluasi, dan penguatann (*enhancement*).

Secara gamblang tahapan-tahapan pelaksanaan KKN Internasional dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Tahapan Pelaksanaan

| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Burn (1998) | Berasategi, Roman, 2016 | M. Pechak & Thompson, 2009 | (Baker-Boosamra, 2006) |
| Preparation | Diagnosis | Development | Preparati on |
| Accomplishm ent | Gathering information | Design | Action |
| Final assessment | Design | Implementati on | Reflectio n |
| | Implementati on | Evaluation | Reioproc ity |
| | | Enhancement | |

2.4 Tantangan Pelaksanaan KKN Internasional

Dalam melaksanakan kegiatan selalu ada tantangan dan rintangan, terlebih dengan KKN Internasional yang pelaksanaanya di negara asing yang konteks budaya, demografis, dan sosioogisnya berbeda. Seperti halnya program magang dan kegiatan layanan sosial lainnya (seperti Community Service Program, dan International Service Learning), KKN Internasional memiliki banyak tantangan. Bahkan tangangannya lebih besar daripada KKN dalam negeri.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

35

Holland (1999) menyebut 5 tantangan bagi pelaksana KKN Internasional: (1) kurangnya informasi atau sumber (*resources*) untuk mengintegrasikan *service-learning* dengan matakuliah yang ada; (2) menyusun matakuliah baru (*new coursework*); (3) penolakan terhadap layanan yang diberikan, (4) kesulitan logistik untuk penempatannya (*rescheduling*) di masyarakat; (5) kurangnya waktu untuk komunikasi, kolaborasi dan perencanaan, dan (6) terbatasnya dana untuk membuat program. Tryon (2008) merumuskan 5 tantangan dalam pelaksanaan (ISL) *Insternasional Service Learning* (termasuk di dalamnya KKN Internasional) bagi tim pelaksana (*administrators*). (1) waktu yang dimiliki oleh staf (*investment of staff time*); (2) kemampuan staf untuk melakukan pelatihan dan pengawasan; (3) ketidaksesuaian (*incompatibility*) dengan layanan langsung ke pihak yang dilayani (*client*); 4) waktu dan pengelolaan proyek, (5) dan masalah kalender akademik. Selanjutnya, George & Shams (2007) satu tantangan utama dalam pelaksanaan KKN Internasional, yakni: kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan ukuran kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan, disarankan agar penilaian mencakup berbagai aspek seperti: keberhasilan teknis, keberlangsungan proyek kegiatan, dan dampaknya yang lebih luas.

Peserta mungkin mengalami beberapa tantangan dalam mengikuti KKN Internasional (ISL), antara lain: budaya, bahasa,



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

36

logistik, dan tantangan alam. Pada saat mereka menghadapi lingkungan yang baru, mereka menghadapi perbedaan budaya. Disamping itu, mereka juga bisa menghadapi tantangan bahasa dimana mereka harus berbicara. Oleh karena itu, segala persiapan harus dilakukan dalam hal tempat tinggal, perkakas masak, dan lain-lain.

Demikian juga tantangan tempat tinggal. Tempat tinggal tidak selalu terjangkau bagi semua peserta; oleh karena itu, mereka bisa memilih apakah mereka akan tinggal di rumah sewa (*apartemen*) atau rumah warga, dimana mereka mendapatkan layanan gratis. Tantangan lainnya adalah cuaca dan iklim yang berbeda dengan asal negara peserta.

Pada pihak penerima layanan, tantangan bisa datang dari akomodasi, makanan yang cocok dengan selera peserta, bahasa, alat-alat yang dibutuhkan selama tinggal di negara tujuan. Tantangan tersebut bisa bervariasi dari satu negara dengan negara yang lainnya tergantung sejauhmana perbedaan budaya antara negara peserta dan negara tujuan.

BAB III

KKN INTERNASIONAL DI PTAI

Bagian ini membahas metode penelitian sebagai roda penggerak dalam menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan pada Bab sebelumnya. Adapun rangkaian pembahasan yang ada dalam Bab ini meliputi desain penelitian, langkah-langkah pengembangan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, luaran hasil penelitian dan pengembangan, dan simpulan. Masing-masing sub-topik tersebut disajikan berikut ini.

3.1 Desain KKN Internasional

Penelitian ini didesain dengan pendekatan “Penelitian dan Pengembangan” (*Research and Development*). Salah satu ciri khas dari desain penelitian ini adalah adanya produk atau model yang terstandar untuk digunakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gall, Gall, dan Borg (2003:569) bahwa:

“Research and Development is an industry-based development model in which the findings of the research are used to design new products and procedures, which then are systematically field-tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar standard.”

Istilah *product* yang terdapat dalam pernyataan di atas, mengadopsi ungkapan Borg & Gall: (1979: 624), tidak hanya

mengacu pada objek material, seperti buku pedoman KKN Internasional, materi KKN Internasional, media KKN Internasional, dan dokumen KKN Internasional, melainkan juga mengacu pada proses atau prosedur mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan KKN Internasional.

Selaras dengan pemikiran tersebut, yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini, untuk menemukan atau membuat produk Pengembangan model KKN Internasional untuk mahasiswa calon guru di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang dibutuhkan oleh pengguna dan stakeholder.

3.2 Langkah-Langkah KKN Internasional

Langkah penelitian mengikuti tahap-tahap penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall (1976:626) yang telah dimodifikasi. Secara umum, langkah-langkah tersebut dipaparkan di bawah ini.

3.2.1 *Studi Eksploratoris*

Pada tahap eksplorasi ini, peneliti akan mencari model KKN Internasional yang terdapat di beberapa PTAI yang sudah melakukan KKN Internasional ke negara-negara ASEAN, diantaranya IAIN Tulungagung, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penemuan

model di lapangan secara empirik (praktis) akan memberikan informasi mengenai : (a) kondisi pelaksanaan KKN Internasional yang dilaksanakan di beberapa PTAI; (b) sistem pendidikan dan pelatihan di PTAI; (c) kurikulum, (d) kebutuhan pengembangan, (e) potensi, dan (f) permasalahan yang dihadapi.

3.2.2 Verifikasi Model

Pada tahap ini, peneliti akan memverifikasi Model KKN Internasional yang diperoleh dari beberapa PTAI tersebut. Verifikasi model mencakup langkah-langkah berikut: (1) Melakukan validasi teoritis konseptual kepada para ahli, (2) Melakukan validasi kelayakan model kepada para praktisi, (3) Melakukan uji coba terbatas, mengenai kelayakan terapan perangkat model yang representative untuk diimplementasikan, (4) Melakukan analisis prediktif dan sistemik terhadap hasil uji coba terbatas, sehingga dapat diuji mengenai; kelayakan sistem model pengembangan, kelayakan kerangka model, dan kelayakan alat atau instrument penelitian dan pengembangan model, (5) Melakukan *Triangulasi*, tahap yang ditempuh dengan suatu teknik untuk menentukan data lain sebagai pembanding, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dengan pihak *stake holder*. Menurut Alwasilah (2006:176) dan

Arikunto (1993), triangulasi merujuk pada dua konsep yang dimensionalitas melalui sudut pandang yang jamak dan stabilitas. Sumber-sumber, metode, dan teknik yang berbeda - bila digabungkan dapat meningkatkan kredibilitas.

Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan angket dilakukan untuk merekam aktivitas responden yang terdiri dari aktivitas Perguruan tinggi Agama Islam (PTAI), para mahasiswa peserta KKN dan *stakeholder*. Wawancara dilakukan untuk mengetahui opini, persepsi, penilaian, intuisi, dan ingatan mereka tentang pengalaman survei yang dilakukan dengan landasan informasi jawaban yang dikerjakan di lapangan. Adapun alasannya, untuk meningkatkan reliabilitas dan mengecek validitas isinya yang dilandaskan pada data yang diperoleh dari responden (Alwasilah, 1991:96).

3.2.3 Implementasi Model

Dalam menerapkan model ini baik penentu kebijakan / Pimpinan, dosen pembimbing dan ahli di bidang KKN bergabung sebagai tim untuk mengimplementasikan model yang telah dipandang *valid*. Kegiatan yang dilakukan mengacu kepada fokus pengembangan model, meliputi; analisa dan penyusunan kerangka sistem model KKN internasional, manajemen pengembangan model KKN internasional dan strategi, metode pelaksanaan, serta pola evaluasi dan pengembangan model KKN Internasional.

Selama penerapan model (*treatment*), dilakukan *research* dan evaluasi terhadap implementasi fokus kajian pengembangan mode. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan revisi model yaitu melakukan revisi terhadap rancangan dan implementasi model dengan melibatkan peneliti dan tim PTAI. Aspek-aspek yang akan diteliti dalam tahap ini adalah: (1) Dampak secara kelembagaan meliputi: (a) terbentuknya suatu model KKN Internasional yang inovatif dan inspiratif, (b) terlembagakannya manajemen model KKN Internasional, (c) Aplikasi pola evaluasi dan pengembangan model KKN Internasional. (2) Dampak secara individu meliputi: (a) terbentuknya kemandirian Mahasiswa, dan (b) adanya peningkatan kemampuan atau *Skill* mahasiswa.

3.2.4 Evaluasi dan Pengembangan

Evaluasi merupakan suatu proses pembuatan pertimbangan tentang nilai atau manfaat program, proses dan hasil. Sedangkan pengembangan diarahkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan mengenai suatu program. Keputusan yang diambil mungkin berupa penghentian program, perbaikan program, lanjutan program, perluasan program dan/atau pengembangan program. Pentingnya pengembangan yang ditarik dari hasil penilaian itu didasarkan kepada asas *life long education* dimana

program itu tidak merupakan kegiatan sekali tindakan atau sekali selesai.

3.3 Negara Tujuan KKN Internasional

Subjek penelitian pada tahap eksplorasi adalah para stakeholder dari beberapa PTAI yang sudah dan masih melaksanakan KKN Internasional berikut ini: IAIN Tulungagung, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sedangkan pada tahap implementasi model KKN Internasional, subjek penelitian adalah para stakeholder yang terdapat di negara-negara yang menjadi tempat KKN Internasionalnya IAIN Tulungagung, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejauh ini, berdasarkan informasi dari media internet, mereka melaksanakan KKN Internasional untuk dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand. Selain itu pada tahap ini, subjek penelitian juga difokuskan pada mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Internasional. Informasi tentang pelaksanaan berbasis pengalaman akan diperoleh dari para mahasiswa.

3.4 Luaran KKN Internasional

Luaran penelitian pada tahap eksplorasi akan meliputi (a) informasi yang mendalam dan komprehensif tentang pelaksanaan KKN Internasional dari studi dokumentasi dan para stakeholder beberapa PTAI, (b) informasi tentang materi atau kegiatan KKN Internasional yang dilakukan beberapa PTAI, dan (c) pendapat atau opini tentang keefektifan pelaksanaan KKN Internasional yang dilakukan beberapa PTAI. Sedangkan luaran penelitian pada tahap pengembangan akan berbentuk model baru KKN Internasional yang telah diujicobakan secara terbatas yang dianggap cocok untuk mengembangkan KKN Internasional.

3.5 Simpulan

Sebuah model melalui penelitian dan pengembangan ini akan berhasil dirumuskan setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari eksplorasi terhadap pelaksanaan KKN internasional yang selama ini dilaksanakan dan memberikan rekomendasi terhadap model KKN Internasional yang dibutuhkan selama ini; pengembangan dengan cara merancang model KKN Internasional berdasarkan masukan dari tahap pertama dan melakukan uji kelayakan terhadap rancangan model yang ditawarkan; dan uji coba lapangan untuk melihat keefektifan model yang dibuat.

Model yang dikembangkan akan memiliki karakteristik sebagai berikut: dari segi input, karakteristik yang muncul



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

44

meliputi mahasiswa, metode, materi, dosen pembimbing, masyarakat (*user*) dan media; dari segi proses, karakteristik pengembangannya terdiri dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi; sedangkan dari segi output, karakteristiknya berupa produk atau model KKN Internasional. Diharapkan model yang dikembangkan dapat menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan KKN Internasional bagi perguruan tinggi di lingkungan PTAI. Selain itu, model inipun diharapkan bisa memberi gambaran bagi *stake holder* dan *customer* dalam merancang *standard operational procedure* (SOP) KKN Internasional.

BAB IV

PELAKSANAAN KKN INTERNASIONAL

Bab ini menyajikan data-data yang diperoleh dari Angket dan Wawancara terkait model KKN Internasional yang dikembangkan oleh empat universitas yang berbeda, yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Proses penyajian data ini didasarkan secara tematik sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian. Hal ini dimaksudkan konsistensi pertanyaan dengan jawaban penelitian dapat terlihat lebih real dan analitik. Dengan kata lain, Bab IV ini meliputi penyajian data tentang bagaimana pelaksanaan KKN Internasional, khususnya bagi mahasiswa calon guru dilaksanakan di lingkungan PTAI, yang selama ini telah dilaksanakan oleh ke empat universitas tersebut dan sejauh mana keefektifan pelaksanaan KKN Internasional dilihat dari respons *stake holder* maupun *user*.

4.1 Realitas Perlunya KKN Internasional bagi Mahasiswa (calon Guru) di Lingkungan PTAI

KKN Internasional dipandang sebagai kegiatan yang perlu dilakukan bahkan sangat perlu dilakukan bagi PTAI. Dengan kata lain semua *stakeholder* (pimpinan fakultas dan jurusan, dan

perguruan tinggi) menganggap KKN internasional ini sesuatu yang perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Pandangan positif terhadap kegiatan ini dibuktikan dengan beberapa upaya yang serius dari pihak perguruan tinggi seperti hal-hal berikut ini:

4.1.1 Mengupayakan Berbagai Cara Agar Program ini Terus Berlangsung

Seiring dengan perkembangan zaman, maka tingkat pendidikan pada masyarakat mengalami peningkatan. Oleh sebab itu pendidikan pada tingkat perguruan tinggi dipandang sangatlah penting bagi masyarakat. Perguruan tinggi dengan produknya berupa jasa pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Strategi yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus pengabdian kepada masyarakat adalah institusi pendidikan yang memosisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang dapat memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pelanggan (Tampubolon, 2001). Pelayanan yang dilakukan oleh dua PTAI yang terlibat dalam penelitian ini yaitu KKN Internasional.

Melihat perlunya pelayanan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh keempat PTAI untuk terlaksananya KKN Internasional. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi penjalinan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

47

Nota Kesepahaman dengan berbagai lembaga di negara-negara pilihan yang bersedia. Dengan upaya tersebut, terjalinlah Nota Kesepahaman dengan negara Thailand yang memandang perlunya kegiatan KKN dilaksanakan di negaranya. Setelah berjalan selama kurang lebih dua tahun, terjadi moratorium terhadap pengiriman mahasiswa dari Indonesia ke Thailand atau sebaliknya. Berikut paparan salahsatu *stakeholder* dari Responden 2:

“Pemerintah sedang memostatariumkan pengiriman dan penerimaan mahasiswa asing ke dan dari seluruh negara. Hal ini tentu memerlukan strategi agar kegiatan ini berlangsung untuk kedepannya.”

Moratorium dalam kamus Webster online diartikan sebagai *“a legally authorized period of delay in the performance of a legal obligation.”* Definisi tersebut menunjukkan bahwa moratorium adalah menghentikan suatu kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, moratorium pengiriman mahasiswa ke luar negeri dapat diartikan sebagai penundaan atau terpaksa diberhentikan dan dibuka kembali dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, tentu saja memerlukan upaya yang kontinyu dari pihak yang memerlukan dibuka kembali jalan KKN Internasional.

Perguruan tinggi berusaha agar program ini berjalan meskipun terdapat moratorium untuk menghentikan pengiriman ke negara tujuan. Namun begitu Perguruan Tinggi mencari cara lain dengan melibatkan kebutuhan di lapangan dan analisa

kemananan dari masyarakat setempat. Salah satu cara yang dilakukan yaitu terjalinnya komunikasi dengan pihak Thailand melalui asosiasi alumni yang lebih dikenal dengan *Abroad Alumni Association of Southern Border Provinces*. Berkat upaya yang ekstra inilah, pengiriman mahasiswa ke luar negeri diizinkan kembali oleh pemerintah.

4.1.2 Pembuatan Dokumen Kerjasama (MoU)

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal, *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang dimaksud *memorandum* adalah: “*Is to serve as the basic of future formal contract or deed*”, Yang artinya adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang. Dan yang dimaksud dengan *understanding* adalah: “*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral.*” Artinya adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak

pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis dokumen MoU bukan merupakan dokumen yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindak lanjuti dengan perjanjian. Kesepakatan dalam MoU hanya bersifat ikatan moral. Secara praktis MoU disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Namun, yang terpenting dari MoU ini bukanlah pandangan teoritis atau praktisnya, melainkan tujuan dibuatnya MoU.

Keseriusan PTAI dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap mahasiswa dan masyarakat terus digalakan dengan salahsatunya pembuatan dokumen kerjasama. Dengan kata lain, untuk menguatkan pelaksanaan KKN internasional secara berkelanjutan, pihak perguruan tinggi merancang MoU dan melakukan penandatanganan terhadap dokumen tersebut. Hal ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari pihak lembaga tempat KKN tersebut dilakukan. Berikut ini paparan salah satu *stakeholder* dari Responden 2:

“Acuan legalitas kami dalam melaksanakan KKN Internasional yaitu MoU yang kami rancang bersama-sama dengan pihak terkait.”

Tujuan lain dari dibuatnya MoU ini yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan kerjasama. Responden 1 mengungkapkan bahwa:

“Kami berharap melalui MoU ini masing-masing pihak dapat merasakan manfaatnya. MoU ini dapat menjadi alat ukur sejauhmana kita sepakat tentang hal-hal yang kita sepakati.”

Penyusunan dokumen MoU ini melibatkan berbagai pihak, terutama LP2M, Dekanat, dan Rektorat bagi Responden 2 dan Dekanat dan Rektorat bidang Kerjasama bagi Responden 1. Beberapa dokumen MoU antara PTAI dengan lembaga-lembaga di Thailand dapat dilihat dalam Lampiran.

4.1.3 Penganggaran Secara Resmi Untuk Kegiatan KKN Internasional

Akar kata dari penganggaran yaitu anggaran yang berarti rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi (pemasaran, produksi dan keuangan). Sehingga kata penganggaran dapat diartikan sebagai penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi (Jogiyanto, 2007). Dalam hal ini, Nafarin (2007:11) memberikan definisi penganggaran sebagai



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

51

penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

Kedua PTAI yang melaksanakan KKN Internasional telah menghitung besaran biaya yang diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan keperluan peserta KKN Internasional. Terutama kaitannya dengan anggaran pelaksanaan KKN Internasional, sebagai langkah awal yang dilakukan oleh kedua PTAI, biaya pelaksanaannya dibebankan kepada para mahasiswa yang meliputi transportasi dan *living cost*. Menurut data yang diperoleh melalui Angket, para peserta KKN Internasional dari Responden 1 dibebankan sekitar 5 – 6 juta untuk 1 bulan karena akomodasi sudah ditanggung oleh pihak negara tempat KKN. Sedangkan para peserta KKN Internasional dari Responden 2 dibebankan biaya *living cost* dan keperluan saja sebesar 6 – 7 juta untuk 3 bulan. Adapun biaya keberangkatan sudah dibebankan kepada universitas dan biaya akomodasi sudah dibebankan kepada pihak penerima peserta KKN Internasional. Hal tersebut sudah disepakati dalam MoU. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang stakeholder dari Responden 2 bahwa:

“Dari pihak universitas hanya mengcover ongkos berangkat bersama dengan DPL. Adapun tempat tinggal sudah disediakan di Pattani, sesuai kesepakatan.”

Namun, langkah berikutnya KKN Internasional dianggarkan tiap tahun lewat Rencana Anggaran Kegiatan perguruan tinggi bersangkutan. Meskipun anggaran ini tidak sepenuhnya dapat menanggulangi segala kebutuhan peserta KKN internasional, setidaknya sudah membantu peserta meminimalisir membengkaknya biaya selama di Thailand. Tindakan seperti ini menjadi bukti bahwa KKN internasional perlu atau bahkan sangat perlu dilakukan.

4.1.4 KKN Internasional dan Dampak Positifnya

Tentunya adanya KKN Internasional ini memiliki dampak positif baik terhadap mahasiswa, lembaga penerima KKN Internasional, maupun perguruan tinggi penyelenggara KKN Internasional. Dampak positif bagi PTAI itu sendiri berupa meningkatnya nilai akreditasi dari BAN-PT, meningkatnya animo masyarakat untuk menguliahkan anak-anaknya ke PTAI, sarana untuk promosi PT di negara sasaran, memberi peluang bagi dosen untuk melakukan riset atau pelatihan di luar negeri, dan menaikkan grade perguruan tinggi melalui dokumen MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang *stakeholder* dari kedua PTAI bahwa:

“Dengan adanya KKN Internasional, nama kami semakin harum di mata Internasional dan nasional, di mata masyarakat, dan mahasiswa itu sendiri. Bahkan, kami dinilai baik oleh BAN-PT.”



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

53

Dampak positif dari KKN Internasionalpun dirasakan oleh lembaga penerima KKN Internasional di Thailand. Hal ini diketahui dari wawancara bersama dengan DPL yang sempat menceritakan pengalamannya. Menurutnya, pihak lembaga di Thailand merasa sangat terbantu dengan adanya KKN Internasional. Sebagai contoh, kegiatan KKN Internasional ini yang melibatkan peserta untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar telah membantu para siswa di Thailand untuk belajar dengan cara-cara yang lebih kreatif. Konsekuensinya yaitu meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tempat KKN internasional itu diselenggarakan. Konsekuensi lainnya yaitu banyak para siswa yang ingin melanjutkan studinya ke Indonesia. Berikut ujarannya:

“Sebelumnya dari sekolah-sekolah di Thailand itu mengirim para siswanya ke Malaysia dan Timur Tengah, semenjak ada KKN Internasional ini banyak hingga ratusan mahasiswa di sini datang dari Pattani, Thailand.”

Selain itu, dampak positif dari KKN Internasional ini juga sangat dirasakan oleh para peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Bagi mereka KKN Internasional memberikan manfaat sebagai berikut: pemahaman akan budaya dari sebuah negara. Selain itu pengalaman mengikuti KKN internasional dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dan membuka peluang kerja untuk masa depannya. Berikut ini salahsatu paparan yang diungkapkan peserta KKN Internasional bahwa “Dari kegiatan KKN ini, Ustadz,

ada beberapa teman diminta untuk mengajar di Pattani setelah kami lulus nanti dari sini. Jadi, alhamdulillah sudah terbuka kesempatan kerja.”

4.2 Pelaksanaan KKN Internasional bagi Mahasiswa Calon Guru di Lingkungan PTAI

Maksud istilah pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh para *stakeholder* dan *user* dalam mensukseskan program KKN Internasional mulai dari proses awal hingga akhir dengan capaian terciptanya kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pengertian ‘pelaksanaan’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diperoleh secara daring yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan mulai dari rancangan, keputusan, dan sebagainya. Definisi inipun seirama dengan definisi yang diungkapkan oleh Hanifah (2002) bahwa pelaksanaan adalah implementasi serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Begitupun definisi yang diberikan oleh Usman (2002:70) terhadap pelaksanaan memberikan warna yang mempertegas makna pelaksanaan yaitu implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan-tindakan, atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

Menurut data yang diperoleh melalui Angket dan Wawancara, pelaksanaan KKN Internasional oleh ke empat universitas yang terlibat dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga langkahn besar yang saling terkait satu sama lain, diantaranya langkah sebelum pelaksanaan (pra-pelaksanaan), langkah saat pelaksanaan (pelaksanaan), dan langkah setelah pelaksanaan (pasca-pelaksanaan). Masing-masing langkah diperkaya oleh berbagai kegiatan yang relevan demi terwujudnya pelaksanaan KKN Internasional. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan KKN internasional berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder* dari universitas-universitas yang terlibat dalam penelitian ini.

4.2.1 Pra-Pelaksanaan KKN Internasional

Pra-pelaksanaan adalah sebuah istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh dari empat universitas di Indonesia terkait adanya perbedaan istilah dari masing-masing universitas. Misalnya, UMSU dan UMY mengistilahkan pra-pelaksanaan sebagai tahap perencanaan, UMP mengistilahkan sebagai tahap awal, dan UINSA mengistilahkan sebagai tahap survey. Ketiga istilah tersebut kemudian digabungkan menjadi tahap pra-pelaksanaan karena semua kegiatan yang terdapat dalam istilah tersebut dilakukan sebelum KKN Internasional dilaksanakan.

Dalam proses menghimpun informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ke empat universitas sebelum melaksanakan KKN Internasional, Angket dan Transkrip wawancara ditandai atau diberi kode secara tematik sesuai kategori yang sudah disiapkan, diantaranya kategori *Pre*, *Whilst*, dan *Post*. Data-data yang termasuk kategori *Pre* ditandai warna kuning atau ditulis *pre*. Data-data yang dikategorikan *Whilst* diberi warna hijau atau ditulis *Wh*. Sedangkan *highlight* warna merah diberikan untuk data-data yang termasuk kategori *Post*. Berdasarkan kategorisasi data yang terdapat dalam Angket dan Transkrip Wawancara, terhimpun beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam Pra-Pelaksanaan KKN Internasional: a) Korespondensi; b) Survei atau Studi Awal; c) Penandatanganan MoU; d) Perekrutan Peserta KKN Internasional; e) Tes Seleksi Peserta KKN Internasional; f) Penerbitan Passport; g) Pembekalan; h) Penentuan DPL; dan i) Pengantaran ke Negara Tujuan.

4.2.1.1 Korespondensi

Langkah pertama yang dilakukan oleh salah satu universitas yang terlibat dalam penelitian ini (UMSU) yaitu korespondensi. Korespondensi merupakan istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak UMSU melalui Kantor



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

57

Urusan Internasional (KUI) melakukan korespondensi terlebih dahulu dengan pihak negara tujuan, melalui konsulat (KBRI) dan diteruskan ke Badan Alumni Mahasiswa Thailand. Berikut ini pernyataan dari KUI terkait hal tersebut:

“Intens komunikasi ke konsulat, kalo kita mengirim mahasiswa itu juga ngirimkan by email berkomunikasi dengan konsul, karena daerah selatan itu ada zona merah seperti patani, untuk keamanan. Jadi pernah saya di ajak staff konsul dan temen-temen melakaukan evaluasi kkn juga tapi kkn ini dilakukan oleh badan alumni mahasiswwa Thailand yang pernah kuliah di Indonesia.”

Langkah yang cukup prosedural ini tampaknya hanya dilakukan oleh UMSU. Ketika ditanya alasan utama yang melatarbelakangi terwujudnya KKN Internasional ini, KUI menjelaskan bahwa ada perintah yang sifatnya *top-down* dari pemimpin pusat yang direspon oleh para pejabat di bawah (Tampubolon, 2001). Salahsatu bentuk responnya yaitu menghubungi pihak negara tujuan melalui email dan *by phone*.

Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa melalui korespondensi ini, pihak KUI memerlukan waktu sekitar tiga mingguan untuk memperoleh balasan dari pihak negara tujuan. Waktu tersebut sangat wajar karena pihak negara tujuan tentu harus mempelajari pengajuan dari pihak KUI UMSU. Namun, ketika gayung bersambut, jalan berikutnya menjadi lebih mudah. KUI menyebutkan:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

58

“Ibarat kata, kita sudah tahu tujuan dan apa yang harus disiapkan dari sekarang untuk melakukan KKN Internasional ini.”

Selain itu, pihak KUI juga memperoleh hikmah tak terhingga dari silaturahmi intens melalui email dengan pihak konsulat, badan alumni mahasiswa thailand, dan sekolah-sekolah. Diantara manfaat yang diperolehnya yaitu selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan islami yang dilakukan oleh negara tujuan. Berikut ini ungkapan KUI:

“Tapi memang hubungan yang paling penting itu payung support dari PT itu dan menjaga komunikasi intens dengan konsul (KBRI), ibaratnya kalo sering ngomong kalo ada kegiatan-kegiatan mereka pasti ‘OK universitas ini’. Maksudnya sering mendengar nama Universitas kita pasti mereka inget kala da event pasti mereka mengundang. Dan Alhamdulillah kita baru menghadiri melayu day bersama UI dan UIN menado karena mereka mayoritas muslim, maka yang diajak muslim, seperti itu. Jadi intens komunikasi ke konsulat, kalo kita mengirim mahasiswa itu juga ngirimkan by email berkomunikasi dengan konsul, karena daerah selatan itu ada zona merah seperti patani, untuk keamanan.”

Manfaat yang diperoleh dari korespondensi bagi pihak UMSU seperti yang diungkapkan di atas yaitu memperoleh pengakuan dari pihak konsulat, memperoleh pengamanan terhadap mahasiswa yang sedang menjalankan KKN, dan memperoleh undangan istimewa dari konsulat untuk hadir dalam even keagamaan seperti Melayu Day.

4.2.1.2 Survei

Pada tahap survei ini menurut data Angket dan wawancara diketahui bahwa seluruh universitas yang terlibat dalam penelitian ini melakukan survei ke lokasi di negara tujuan. Survei merupakan suatu metode untuk menentukan hubungan-hubungan antar variabel serta membuat generalisasi untuk suatu populasi yang dipelajari (Musa, 1998). Survei mampu mengerjakan hal tersebut karena prosedur pengumpulan data yang dipergunakan telah distandardisasikan.

Hanya saja bagi UMSU, survei ini merupakan langkah berikutnya setelah terlebih dahulu ada komunikasi melalui email atau sering disebut dengan istilah korespondensi. Berikut ungkapannya:

“... dan biasanya yang kami lakukan itu, sebelum anak -anak berangkat kita survey dahulu. Jadi berangkat kkn nya itu di bulan 8, kami sekarang sudah survey untuk melihat tempat yang didiami anak-anak kami itu aman dan layak. Baik sisi akademik, social, dan yang lainnya..”

Berbeda dengan tiga universitas lainnya, survei ini merupakan langkah pertama dalam memulai KKN Internasional. UMY misalnya mengungkapkan bahwa survei dilakukan saat study banding ke negara tujuan. Berikut ungkapannya:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

60

“Awalnya hanya study banding atau exchange, kita coba akhirnya KKN Internasional sekalian penjajakan.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses survei ini tidak direncanakan sebelumnya melainkan dilakukan dengan melihat peluang yang ada. Peluang tersebut diawali dengan program komparatif studi ke negara tujuan. Dari peluang tersebut, terciptalah sebuah program gemilang yang dapat mendongkrak nilai akreditasi universitas, fakultas, dan prodi, yaitu KKN Internasional. Terlebih program tersebut dapat juga membuka dan menambah wawasan baru bagi para *stakeholder* dan mahasiswa.

Survei juga merupakan langkah awal yang dilakukan oleh UINSA bahkan tampaknya UINSA melakukannya lebih fokus karena survei yang mereka lakukan berbasis hasil penelitian para dosen. Dengan kata lain, terdapat sekelompok dosen yang meneliti tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan beberapa universitas di negara-negara tujuan. Rekomendasi dari penelitian tersebut berujung pada upaya untuk melakukan KKN Internasional. Salahsatu upayanya yaitu melakukan survei ke lokasi di negara tujuan dengan tujuan untuk mengidentifikasi fenomena atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat di negara tujuan. Berikut ini ungkapan wawancara dengan *stakeholder* UINSA:

“Itu semua ada researchnya, ada pemetaan research lalu ada rekomendasinya, rekomendasinya dimungkinkan apakah adanya kerjasama dalam bentuk KKN.”



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

61

Survei ini dilakukan oleh *International Office* (IO) atau, meminjam istilah yang digunakan oleh UMSU dan UMY, Kantor Urusan Internasional bekerjasama dengan pimpinan fakultas penyelenggara KKN Internasional. Hal ini diperoleh dari data wawancara ketika pihak IO ditanya oleh tim peneliti, sebagai berikut:

Peneliti: *International Office* itu sekaligus jadi EO nya yah?

Stakeholder UINSA: iya IO jadi EO nya juga.

Cukup jelas bahwa terdapat kesamaan kepengurusan antara UMSU, UMY dan UINSA dalam hal menginisiasi program KKN Internasional. Kesamaan kepengurusan ini didukung oleh KUI dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang juga menginisiasi program tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan ketua KUI dari UMP:

“Kami, KUI, dan fakultas melakukan survei ini untuk mengukur jarak tempuh dan kondisi transportasi yang ada disana. Dari survey itulah kita dapat evaluasi lalu barulah kita beli tiket.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terjadi koordinasi antara KUI dan Fakultas yang akan menggerakkan mahasiswanya untuk mengikuti program KKN Internasional. Koordinasi seperti ini akan menghasilkan takerja yang harmonis antara kedua belah pihak sehingga menghasilkan sebuah program KKN Internasional

yang tertata dengan baik dan sistematis. Tujuan utama dilakukannya survei oleh UMP ini yaitu salahsatunya untuk

Dilihat dari hasil angket dan wawancara, ke empat universitas yaitu UMSU, UINSA, UMY dan UMP sama-sama melakukan survei untuk memperoleh informasi terkait negara tujuan baik lokasi, jarak tempuh, keamanan, dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.

4.2.1.3 Penandatanganan MoU

Data yang diperoleh melalui angket dan wawancara juga menunjukkan bahwa sebelum memberangkatkan mahasiswa ke negara tujuan untuk melakukan KKN Internasional, ke empat universitas yang terlibat dalam penelitian ini telah menyusun dan menandatangani MoU dengan pihak negara tujuan. Istilah MoU ini merupakan singkatan dari *memorandum of understanding* yang didefinisikan secara perkata dalam Black's Law Dictionary bahwa *memorandum* adalah "*to serve as the basic of future formal contract or deed.*" Dengan kata lain, *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang (Salim, 2007).

Sedangkan yang dimaksud dengan *understanding* adalah: "*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral.*" Makna yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu pernyataan persetujuan secara tidak

langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian: *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Istilah MoU ini dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan padanan kata sebagai "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan" (Lihat situs resmi bpkp.go.id). Khusus untuk istilah Nota Kesepahaman dapat ditemukan keberadaannya dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tampaknya istilah Nota Kesepahaman ini tidak dikenal keberadaannya. Selain pasal tersebut, di dalam pasal berapakah Nota Kesepahaman atau MoU ini ditemukan? Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar pula bagi Nota Kesepahaman khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa Nota Kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar Nota Kesepahaman.

Walaupun dalam praktiknya, menurut Munir (2002), Nota Kesepahaman sering dipandang sebagai kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani, namun dalam realitanya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Dalam konteks KKN Internasional yang dilakukan oleh empat universitas islam yang terlibat dalam penelitian ini, MoU atau Nota Kesepahaman dilakukan dengan negara tujuan sebagai upaya untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain, dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.

MoU tidak mungkin berdiri sendiri melainkan perlu disusun oleh beberapa *stakeholder* yang bergerak di bidangnya, misalnya pejabat bidang kerjasama atau hubungan internasional. Menurut hasil wawancara dengan keempat universitas islam tersebut diperoleh informasi bahwa proses penyusunan melibatkan beberapa *stakeholder* yang turut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KKN Internasional. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan MoU yaitu 1) Pembantu Rektor Bidang



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

65

Akademik karena KKN terkait dengan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa; 2) Pembantu Rektor Bidang Kerjasama karena KKN Internasional ini perlu dijumpai oleh atasan langsung bidang kerjasama; 3) Dekan karena turut serta dalam hal perijinan KKN terhadap jurusan/prodi; 4) Ketua Jurusan karena tingkat jurusan memberikan andil dalam menyeleksi peserta; dan 5) Ketua LP2M karena KKN Internasional ini merupakan bagian dari salahsatu ranah kerja LP2M yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Proses penandatanganan MoU dilakukan oleh UMSU setelah proses korespondensi yang cukup intens dengan pihak negara tujuan yaitu pada saat survei lokasi. Sedangkan UINSA, UMY dan UMP karena tidak melakukan korespondensi terlebih dahulu, proses penandatanganan MoU dilakukan pada saat survei ke negara tujuan. Berikut beberapa ungkapan para *stakeholder* pada saat diwawancara:

“Melalui korespondensi, akhirnya kita mencapai kesepakatan saat survei untuk melakukan MoU terkait keselamatan, akomodasi, kesehatan, dan biaya lainnya untuk mahasiswa yang akan tinggal cukup lama di negaranya.” (UMSU)

Ungkapan seirama terkait penandatanganan MoU ini diperoleh dari tiga universitas lainnya, UINSA, UMY dan UMP bahwa:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

66

“Pada saat survei lokasi ke negara tujuan itulah kami lakukan penandatanganan MoU agar segalanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.”

Bahkan penandatanganan MoU ini terus berlangsung tidak hanya pada saat survei saja karena permintaan dari beberapa sekolah yang menjadi tempat para mahasiswa mengabdikan ilmunya. Pihak *stakeholder* UMSU misalnya mengungkapkan bahwa UMSU mencapai 17 MoU dengan sekolah-sekolah di Thailand selatan.

“Kita ada kerja sama dahulu, dengan organisasi islam disana, namanya ISSN. Jadi ISSN ini dia mengkepalai sekolah-sekolah di Thailand selatan, kita masuknya dari organisasi itu lalu dia mendistribusikan dimana kita berada. Jadi kami dari sini sudah mendapat nama-nama sekolahnya supaya kita bisa mengklasifikasi untuk anak-anak. Kami mendapatkan 17 MoU dari sekolah-sekolah disana.”

Kemudian, salah satu item wawancara yaitu isu sentral apa yang dibahas dalam MoU? Seluruh universitas atau responden penelitian ini, isu utama yang harus menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman yaitu pembiayaan. Berikut ujarannya:

“Salah satu pembahasan hangat dalam MoU itu yaitu terkait biaya mulai dari berangkat, tinggal, dan kembali lagi ke negara asal.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan KKN Internasional menjadi isu sentral yang harus dibunyikan dalam MoU. Hal terpenting lainnya dari MoU ini yaitu



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

67

penandatanganan. Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Universitas oleh Rektor dan pihak Lembaga negara tujuan, yaitu Kepala Sekolah, Timbalan yang Dipertua MAIWP, Direktur Sekolah atau Presiden Alumni. Fakta yang sering muncul tentang MoU yaitu masih terdapat beberapa pihak yang hanya sampai pada tahap penandatanganan tanpa tindak lanjut. Akan tetapi, dalam dunia akreditasi, salah satu standar penilaian untuk sebuah universitas termasuk prodi di dalamnya yaitu MoU. Asesor tidak hanya akan melihat bukti fisik MoU melainkan juga akan melihat sejauhmana MoU ini ditindaklanjuti. Bukti tindaklanjut MoU ini dapat berupa surat-surat yang dilakukan kedua belah pihak, foto-foto kegiatan, materi kegiatan, dan evaluasi kegiatan.

Selain itu, bukti tidanklanjuti dari MoU ini yaitu terdapatnya sejumlah mahasiswa dari Thailand yang belajar di empat universitas tersebut. UMSU dan UMP misalnya mengungkap sebagai berikut dalam wawancara:

“Mereka menawarkan tempatnya itu sebagai tempat KKN Internasional kita, jadikan akomodasinya mereka tanggung. Timbal baliknya adalah jadi mereka itu mengirimkan siswa-siswa disana kesini.”

Bahkan UINSA tidak hanya menjalin kerjasama (MoU) dengan Thailand tapi juga dengan Malaysia sejak 2015. Berikut ini pernyataannya:

“Makanya kita kerjasama dengan konsulat disana. Terkait dengan sisi kerjasamanya, seperti di Thailand, kerjasamanya dengan lembaga keagamaan disana, termasuk itu ada alumni dari gontor untuk disana dia konsen pada pendidikan agama. Sedangkan dengan Malaysia, Di Malaysia dari perwakilan disana kerjasama dengan di Kalimantan, kemudian di Malaysia itu penempatannya dikontrol oleh konsulat disana. Kemudian diperkuat dengan kerjasama perguruan tinggi di Kalimantan itu.”

Keseriusan empat universitas dalam menjalankan KKN Internasional ini membuahkan hasil yang gemilang. Di satu sisi tiga dari empat universitas tersebut berstatus universitas swasta. Namun, mereka sudah berani mempertimbangkan dan menjalankan program KKN Internasional ini. Kedepannya, pemerintah diharapkan mempunyai andil dalam penentuan kebijakan KKN Internasional sehingga universitas dan para peserta mempunyai peluang yang lebih tinggi.

4.2.1.4 Seleksi Peserta KKN Internasional

Pada tahap pra seleksi, para calon peserta diminta untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi calon peserta KKN Internasional. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi termaktub dalam Buku Pedoman KKN Internasional yang dikeluarkan oleh salah satu universitas yang terlibat dalam penelitian ini:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

69

Peserta KKN Internasional adalah mahasiswa UMP yang telah memenuhi sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Telah menempuh mata kuliah minimal 110 SKS dan IPK minimal 3.25.
- 2) Tidak sedang mengambil cuti kuliah.
- 3) Telah lulus membaca Al-Quran dibuktikan dengan sertifikat Syahadah dari LPPI.
- 4) Tidak sedang dalam keadaan hamil usia lebih dari 5 (lima) bulan pada saat pelaksanaan KKN.
- 5) Tidak boleh mengambil semester antara.
- 6) Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Sedangkan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta KKN Internasional asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel meliputi:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
- 2) Memiliki kemampuan di bidang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
- 3) Memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran dan Kitab Kuning

b. Persyaratan Khusus

- 1) Mahasiswa semester VI sesuai tahun akademik yang berlaku



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

70

- 2) Menyerahkan foto copy KRS Semester VII dan KHS terakhir
- 3) Menyerahkan foto copy KTP
- 4) Menyerahkan foto copy Ijazah terakhir
- 5) Membuat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti seluruh proses kegiatan dan melaksanakan segala ketentuan program (di atas materai 6000)
- 6) Mengikuti proses seleksi.

4.2.1.5 Tes Seleksi Peserta KKN Internasional

Animo mahasiswa terhadap KKN Internasional sangat tinggi meskipun program ini baru pertama kali dilakukan di berbagai universitas. Setiap universitas memasang target enam calon peserta KKN Internasional. Akan tetapi, pendaftar melebihi kuota yang disediakan. Sehingga pihak universitas menambah kuota berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak internal kampus. Dalam wawancaranya, *stakeholder* UMSU mengungkapkan bahwa:

“Awalnya sih mau mencoba 6 orang saja sebagai penjajakan. Tapi ternyata yang daftar 60 orang. Kami eliminasi 20 dengan diseleksi menggunakan tes.”

Andrew dalam Mangkunegara (Septian, 2015) mendefinisikan seleksi sebagai:

”Selecting is choosing. Any alection is a collection of things chosen. The selection process involves picking out by



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

71

preference some objects or things from among others. In reference to staffing and employment, selection refers specifically to the decision to hire a limited number of workers from a group of potential employees”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan untuk membatasi jumlah peserta yang dapat dilibatkan dari pilihan sekelompok calon peserta yang berpotensi.

Seleksi adalah usaha yang dilakukan suatu lembaga dalam hal ini empat universitas (UMSU, UINSA, UMY, dan UMP) untuk memperoleh peserta KKN Internasional yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Bandits (2014) bahwa seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di sebuah organisasi. Pengertian inipun seirama dengan pernyataan salah seorang *stakeholder* di UINSA bahwa:

“Kami sangat menginginkan peserta KKN itu peserta yang handal, tahan banting, dan mumpuni. Qualifiedlah yang bisa didapat melalui tes seleksi.”

Definisi lain diungkapkan oleh Nidno (2013) menyatakan bahwa proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan, mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan organisasi. Pimpinan KKN Internasional melakukan tes seleksi untuk memperoleh peserta



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

72

KKN yang *adaptable* atau mampu beradaptasi, seperti yang diungkapkan *stakeholder* UMY berikut ini:

“Seleksi ya agar kami memperoleh mahasiswa yang tahu cara beradaptasi dengan orang-orang dan lingkungan baru. Massa disana diem aja karena malu.”

Mengenai tahap seleksi ini, terdapat tiga rangkaian sub-tahapan yang harus dilalui oleh calon peserta, yaitu pra seleksi, seleksi, dan pasca seleksi (Pathel, 2015). Tahap pra seleksi sudah dijelaskan pada pembahasan tentang Perekrutan Calon Peserta KKN Internasional.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, diketahui bahwa keempat universitas yang terlibat dalam penelitian ini melakukan tes seleksi calon peserta KKN Internasional. Ragam tes yang diberikan memiliki kesamaan dan perbedaan antara satu universitas dengan universitas lainnya. Diantara persamaannya yaitu keempat universitas melibatkan kantor urusan internasional dalam melaksanakan KKN Internasional mulai dari awal hingga selesai.

Meskipun semuanya sama-sama melakukan proses seleksi, terdapat perbedaan penyelenggara (*leading sector*) seleksi calon peserta. UMP mengungkapkan bahwa:

“Kami KUI menyediakan tempat tapi yang nguji ya kerjasama dengan prodi bahasa Inggris, Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, dan Psikologi.”



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

73

Pernyataan lebih spesifik diungkapkan oleh UINSA terkait penyelenggaraan tes seleksi calon peserta KKN Internasional. Berikut ini pernyataannya:

“Administrasi dan komunikasi, Kita kerjasama dengan IO, Internasional office. Yang melayani komunikasi internasional, yang menyiapkan tiket-tiket, seleksinya itu dengan pelaksanaan pengabdian. Lalu ketika seleksi, itu hubungannya dengan bahasa, lalu kita kaitkan dengan pusat bahasa uin, lalu juga karena hubungannya dengan mental itu ada tes psikologi, kita kaitkan dengan fakultas psikologi. lalu setelah itu kita adakan test keagamaan, baca kitab kuning, baca al-qurán, terus Bahasa inggris dan yang terakhir Psikologi.”

Begitupun ungkapan dari UMSU ketika diwawancara langsung di kantor Fakultas Agama Islam bersamaan (FAI) dengan perwakilan dari Dekan FAI yang kemudian selanjutnya wawancara dilakukan di kantor KUI. Berikut ini hasil wawancara dengan KUI UMSU:

“Jadi disini penjarangan kita sudah pakai test psikolog (Psikotest), pertanyaan-pertanyaan itu yang di kelurkan oleh team pskolog kita dari dosen psikolog S2 di sini. Kami minta untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang motivasi, karena mereka kan bervariasi motivasi berangkat kesana itu, dari motivasi ini kita lihat apa motivasi mereka kesana. Kalo mereka murni ingin belajar silahkan, tapi kalo yang pengen liburan kita tidak kasih. Ini kita sampaikan ke



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

74

mahasiswa. Lalu yang ke 2 adalah klasifikasi skill, nah itu kita minta yang ahli Bahasa Inggris kita buat kelas pembelajarannya.”

Nada seirama terkait hal ini diungkapkan oleh ketiga universitas lainnya yang jika diramu kurang lebih seperti berikut ini:

“KUI hanya melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan dokumen dari dan ke luar negeri. Untuk urusan seleksi tes, KUI melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan materi yang diteskan dan memfasilitasi tempat pelaksanaan tes seleksi calon peserta KKN Internasional.”

Dari pernyataan di atas cukup jelas bahwa *leading sector* penyelenggara tes seleksi yaitu KUI (Kantor Urusan Internasional). Sedangkan penyeleksi calon peserta KKN Internasional yaitu beberapa lembaga yang terkait dengan materi tes, misalnya tes kemampuan agama melibatkan Fakultas Agama Islam, tes kepribadian melibatkan Prodi Psikologi, tes bahasa Inggris melibatkan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan seterusnya. Hal lain yang menonjol yaitu motivasi yang oleh Lange dan Adler (2012) dan Timmreck (2001) disebut sebagai alat ukur keseriusan seseorang terhadap sesuatu yang akan dijalaninya.

KUI merupakan sebuah lembaga kerjasama yang ada di jajaran rektorat di bawah komando langsung Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Tugas utamanya yaitu untuk memfasilitasi para Prodi

dan mahasiswa dalam mensiasati berbagai kerjasama dengan pihak asing atau luar negeri (Paulson dan Baker, 1999; dan Phoebe, 2010).

Selain ada kesamaan dari *leading sector* antara universitas, dalam proses seleksi peserta, materi seleksi tampaknya memiliki kesamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *leading sector* dari keempat universitas yang terlibat dalam penelitian ini, diperoleh informasi bahwa:

“Standar yang dijadikan seorang mahasiswa terseleksi sebagai peserta KKN Internasional yaitu bahasa Inggrisnya bagus, ngajinya pinter, pemahaman agamanya faham, pengetahuan budayanya luas, mampu mengajar dengan baik, memiliki kesiapan mental, fisik, dan finansial.”

Bahkan tiga universitas (UMSU, UINSA, dan UMP) menjelaskan dengan detail bahwa kemampuan bahasa ditilai dari dua hal yaitu dites secara tertulis dan lisan. Tes tertulis mengharuskan calon peserta KKN Internasional untuk menulis esai tentang *motivation letter*. Tes lisan (salahsatunya untuk mengetahui pemahaman calon peserta terkait budaya) dilakukan ketika mereka diwawancara dan diminta untuk menunjukkan kemampuan mengajar di depan KUI, koordinator fakultas, DPL, dan calon peserta lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu *stakeholder* dari tiga universitas di atas:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

76

“Tes presentasi dan atau mengajar di depan kelas, ya seperti micro teaching. Kemampuan mengajar mereka dites dari berbagai aspek, mulai dari menyusun RPP, memotivasi siswa, menyampaikan materi sampai cara menilai pembelajaran siswa. Bahasa Inggris saat praktik mengajarpun jadi bahan pertimbangan keterlibatan mereka dalam KKN Internasional.”

Sedangkan satu responden yaitu UMY lebih menekankan pada tes lisan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tes kemampuan berbahasa Inggris dilakukan dengan cara meminta mereka berbicara dalam bahasa Inggris menceritakan pengetahuan mereka tentang budaya negara tujuan dan menjelaskan solusi-solusi yang akan dilakukan apabila terjadi konflik budaya. Presentasi dalam bentuk berbicara monolog di depan audien dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kemampuan bicara seseorang (Kapterev, 2011; Rae, 2005). Alasan mengenai pengharusan menguji kemampuan bahasa Inggris secara lisan, pihak UMY mengatakan bahwa:

“Kalau yang internasional itu pertama TOEFL ini pak, tapi sekarang TOEFL 450 itu belum tentu bisa ngomong. Nah akhirnya kita ada tahap selanjutnya yaitu wawancara, nah wawancara itu biasanya mempertanyakan dua hal, tapi banyak variabel apa yang diwawancarakan. Pertama itu komitmen, yang kedua itu cara pikir dia terkait dengan pemberdayaan, misalnya bagaimana pemberdayaan menurut kalian.”

Lalu, kenapa kemampuan mengajar harus diuji bukankah para mahasiswa sudah mengikuti *micro teaching*? Salahsatu alasan kemampuan mengajar perlu diuji yaitu, mengutip wawancara dengan UMSU, untuk memastikan bahwa peserta KKN Internasional siap berbagi ilmu dengan menggunakan metode-metode ajar berbasis penelitian. Selain itu, melalui *micro teaching*, seseorang akan terlihat tingkat kemampuan mengajarnya (Linse, 2005).

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2014) mendukung alasan yang diungkapkan oleh Responden 1 bahwa berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh 0,285 yang berarti 28,5% tingkat kematangan calon guru dipengaruhi oleh mata kuliah *micro teaching*, sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Alasan logis lainnya yaitu tidak semua peserta KKN Internasional berasal dari jurusan atau prodi keguruan (Purwati, 2015).

Berdasarkan data real perihal seleksi peserta KKN Internasional, tercatat dalam Buku Pedoman KKN Internasional bahwa materi seleksi meliputi: 1) Baca tulis Al-Quran dan Kitab Kuning; 2) Bahasa Inggris; 3) Bahasa Indonesia; 4) Tes Psikologi (Intlegensi, Kepribadian, FGD dan Interview); dan 5) Praktik Mengajar.

Para calon peserta KKN Internasional yang sudah mengikuti tes seleksi diberi waktu satu atau dua minggu untuk menunggu

keputusan dari pihak *international office*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

“Tes seleksi itu komponennya banyak. Jadi ya...koordinasi dulu dengan pihak bahasa, psikolog, agama, terus setelah itu kumpulan untuk merundingkan tentang siapa yang layak untuk terlibat dalam KKN Internasional ini karena pendaftarannya sangat banyak. Sementara yang akan terlibat dalam KKN Internasional ini sekita 40 orang saja.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penentuan kelayakkan seseorang sangat diperhitungkan dengan matang. Pelibatan tim penguji yang terdiri dari ketua jurusan dari beberapa jurusan keguruan, lembaga bahasa, prodi psikologi, dan perwakilan dosen dapat menjadi indikator bahwa pihak universitas sangat menginginkan peserta pilihan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang jadi standar KKN Internasional. Pengumuman hasil seleksi, menurut *stakeholder* dari empat universitas tersebut, dapat dilihat di majalah dinding dan media online melalui website kantor urusan internasional, website fakultas atau media sosial masing-masing jurusan.

Setelah pihak UMSU mengumumkan calon peserta yang lulus untuk mengikuti KKN Internasional, menurut pengurus KUI UMSU mereka langsung membantu pengurusan passport para peserta. Berikut hasil wawancaranya:

“Akan tetapi hal terpenting lainnya yaitu peserta yang lulus seleksi diharuskan untuk segera mengurus kelengkapan

dokumen resmi seperti passport, visa, dan ijin tinggal selama 1 bulan di Thailand. Dan kita dampingi hingga selesai.”

Informasi mengenai pengurusan passport ini dibahas pada sesi terpisah untuk menghindari tumpang tindih data atau temuan penelitian ini.

4.2.1.6 Penerbitan Passport

Penerbitan *passport* ini menjadi langkah penting lainnya yang dilakukan dalam kegiatan pra-pelaksanaan KKN Internasional. Tentu, hal ini dapat diasumsikan ‘bagaimana peserta KKN Internasional’ dapat menajalankan tugasnya di negara Asing kalau berangkatnya saja susah karena tidak punya dokumen negara yaitu *passport*?’ Pertanyaan ini tampak sepela, namun tidak bisa disepelekan dalam proses pelaksanaan KKN Internasional. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dan angket, diketahui bahwa seluruh universitas yang terlibat dalam penelitian ini membantu mahasiswa dalam proses penerbitan *passport*.

Setiap universitas memiliki kadarnya masing-masing. Misalnya UINSA hanya memberikan surat rekomendasi atau pengantar bagi peserta KKN Internasional yang ditujukan kepada Imigrasi setempat. Sebagaimana diungkapkan oleh salahsatu *stakeholder* berikut ini:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

80

“Menegenai pembuatan passport dari jauh-jauh hari mereka sudah disarankan untuk membuat passport bahkan kami sediakan surat rekomendasinya agar lancar saat wawancara dan agar imigrasi juga tahu untuk apa dan mau kemana yang bersangkutan itu membuat passport.”

Surat rekomendasi ini sebetulnya tidak tertulis secara resmi sebagai salah-satu syarat pembuatan passport karena setiap individu pengaju pembuatan passport berasal dari latar belakang yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh *stakeholder* di atas, cukup jelas bahwa fungsi surat rekomendasi ini untuk membantu peserta KKN Internasional saat proses wawancara pembuatan passport di imigrasi. Selain itu, dimaksudkan juga agar pihak imigrasi terbantu terkait negara tujuan dan maksud keberangkatan si pengusul passport tersebut.

Lain halnya dengan UMSU terkait penerbitan passport ini. Mereka mendampingi seluruh peserta KKN Internasional terpilih hingga terbitnya passport. Berikut pernyataan *stakeholder* KUI UMSU:

“Dan Alhamdulillah memang anak-anak sampai saat ini anak-anak kita tidak pernah lepas dari kita, mau ngurus paspor pun itu didampingi oleh fakultas.”

Selain itu, pihak KUI UMSU terlebih dahulu menjalin kerjasama atau MoU dengan pihak imigrasi. Mou ini menurut salah satu pengurus KUI (Kantor Urusan Internasional) dilakukan

saat mereka memutuskan untuk melakukan KKN Internasional. Berikut paparannya saat wawancara dengan kami, peneliti.

“Kami berupaya sedetail mungkin mempersiapkan rencana pelaksanaan KKN Thailand ini. Sampe masalah passportpun kami pikirkan. Kami ingin mahasiswa tuh diberi kelancaran oleh pihak imigrasi. Alhamdulillah setelah ada MoU, setidaknya imigrasi tahu bahwa mahasiswa inih mahasiswa UMSU. Jadi gak perlu lagi surat rekomendasi atau apa karena sudah jelas di awal.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa manfaat adanya MoU dengan pihak imigrasi yaitu adanya skala prioritas, walaupun pihak UMSU gak menyebutnya seperti itu, bagi mahasiswa UMSU yang hendak membuat passport dengan tujuan KKN ke Thailand. Bahkan pada wawancara berikutnya, pihak KUI UMSU menyebutkan bahwa manfaat lain dari MoU ini yaitu adanya pembekalan pembuatan passport yang disampaikan langsung oleh pihak imigrasi di kampus UMSU.

4.2.1.7 Penentuan Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen pembimbing lapangan yang lebih dikenal dengan istilah DPL ditunjuk atau dipilih dan diajukan oleh Prodi kepada LP2M dan di SKkan oleh SKkan olehproses penunjukkan atau pemilihan oleh pihak Prodi ini dilakukan dengan cara dan pertimbangan yang beragam. Misalnya pihak UMSU yang mempunyai pertimbangan *budget* menetapkan DPL dari pihak



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

82

jurusan pimpinan jurusan. Berikut pernyataan *stakeholder* UMSU ketika diwawancara:

“Dosen pembimbing itu karena berhubungan dengan budget biasanya dosen pembimbing itu yang sekaligus ikut mengantar dan menetap disana. Kemarin Pak Kaprodi yang berangkat nanti beliau dapat sharing pengalamannya ke dosen-dosen lain.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan KKN Internasional pertama yang dilakukan oleh UMSU, DPL diinisiasi oleh pihak prodi untuk selanjutnya dijadikan bahan pembahasan atau pertimbangan untuk pemilihan DPL pada KKN Internasional berikutnya. Berbeda dengan pemilihan DPL pada pihak UMY. Mereka menyesuaikan jumlah kelompok yang akan ikut KKN Internasional. Satu kelompok KKN terdiri dari 4-5 peserta untuk satu orang DPL. Berikut paparannya:

“Itu per-kelompok 4 orang, yang sekarang 5 kelompok pak, artinya ada 5 DPL. DPL ini adalah dosen-dosen yang pernah atau belum pernah ke luar negeri.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tampaknya tidak ada kriteria khusus untuk pemilihan DPL. Dengan kata lain, siapapun dapat berpotensi jadi DPL tanpa mempertimbangkan kriteria tertentu. Hal ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh UINSA. Pihak UINSA menetapkan kriteria tertentu untuk menjadi DPL yang diantaranya, seperti diungkapkan oleh salah satu *stakeholder* berikut ini:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

83

“Penentuan DPL KKN Internasional ini didasarkan pada prestasi dosen ketika menjadi DPL KKN regular yang diadakan di sekitar Surabaya dan publikasi karya pengabdian masyarakat pada jurnal.”

Kriteria yang diajukan oleh panitia KKN Internasional ini menarik karena dapat memicu semangat setiap dosen untuk melakukan yang terbaik menjelang KKN Internasional berikutnya. Sedangkan pihak UMP lebih mengutamakan pemerataan peran. Mereka mempersilahkan setiap dosen secara bergiliran dari tahun ke tahun untuk menjadi DPL KKN Internasional selama dosen-dosen yang bersangkutan bersedia untuk menjadi DPL. Berikut paparannya:

“Ya kalau dosen setuju untuk mau menjadi DPL ke Thailand, ya tidak masalah kita fasilitasi. Asalkan mereka tidak sedang menjadi DPL di sini. Ya gak boleh rangkap.”

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa dosen yang menjadi DPL tidak hanya dilihat dari kesediaannya akan tetapi dilihat juga dari apakah ada peran ganda atau tidak. Jika dosen tersebut sedang menjadi DPL untuk di sekutar kampus atau domestik lainnya, maka dia tidak diperkenankan menjadi DPL KKN Internasional.

4.2.1.8 Pembekalan

Pembekalan peserta ini merupakan tindak lanjut dari tahapan sebelumnya yaitu seleksi peserta dan penentuan DPL.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

84

Pembekalan ini menjadi rangkaian acara wajib yang dilakukan sebelum para peserta KKN Internasional melaksanakan tugasnya di negara sasaran. Menurut Brook dan Emmert (1989), pembekalan merupakan suatu bentuk pertemuan yang bertujuan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada para peserta agar mereka memiliki wawasan yang lebih luas berkaitan dengan lingkup kerja mereka. Pembekalan ini diikuti tidak hanya oleh peserta tetapi juga oleh DPL KKN Internasional. *Stakeholder* UINSA mengungkapkan bahwa:

“Untuk kelancaran KKN Internasional, DPL wajib hadir pada pembekalan peserta karena mereka juga diberi waktu untuk mempresentasikan rencana monitoring dan evaluasi.”

Keterlibatan DPL dalam pembinaan ini cukup jelas dalam pernyataan di atas yaitu untuk memberikan pengarahannya terkait monev (monitoring dan evaluasi) kepada para peserta KKN Internasiona. Lebih jauh UINSA menyebutkan bahwa:

“Gak lama Pak, pelatihan Bahasa Inggris satu minggu, pembinaan agama dan budaya 3 hari, dan pembinaan kemasyarakatan termasuk teaching 3 hari.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa durasi pembekalan yang diberikan oleh pihak LP2M UINSA yaitu dua minggu dengan pembagian waktu yang sudah ditentukan. Yang menarik dari pelaksanaan KKN Internasional oleh UINSA ini diungkapkan oleh salahsatu *stakeholder* LP2M UINSA sebagai berikut:



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

85

“DPL yang kami pilih dan yang diutus oleh Fakultasnya masing-masing dikumpulkan dalam satu ruangan besar mulai dari jam 8 pagi hingga 16.00 untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang metode KKN Internasional. Selang dua hari kemudian mereka dibimbing lagi bersamaan dengan peserta KKN untuk melihat simulasi KKN Internasional tahun sebelumnya.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembekalan terhadap DPL dilakukan dalam dua hari mulai dari pagi hingga sore. Bahkan pada hari berikutnya DPL dan peserta dilibatkan dalam satu ruangan. Hal tersebut tentu memberikan dampak positif bagi keduanya. Salahsatunya yaitu terjalin silaturahmi antar DPL dan peserta. Sehingga para peserta tidak merasa kesulitan untuk menghubungi DPLnya masing-masing di kemudian hari.

Terkait keterlibatan DPL dan durasi pembekalan, UMSU memiliki perbedaan. DPL dilibatkan sebagai pemberi pembekalan dalam waktu 6 hari kerja. Berikut paparannya:

“Para mahasiswa dibekali materi pengetahuan bahasa dan budaya oleh para mahasiswa Thailand yang belajar disini. Sedangkan materi cara mengajar dibimbing oleh DPLnya.”

Tampak jelas dari pernyataan di atas bahwa DPL memiliki peran sejak pra keberangkatan peserta ke negara sasaran. Menurut buku panduan KKN Internasional, pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan para peserta menghadapi dunia nyata.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

86

Pernyataan dari pihak UMSU tampaknya memiliki kesamaan pernyataan dengan pihak UMP dan UMY bahwa mereka menyediakan waktu 6 hari untuk pembekalan KKN Internasional. Durasi pembekalan ini dibagi-bagi lagi peruntukannya sesuai dengan topik pembekalan, seperti yang diungkapkan oleh salahsatu dari para *stakeholder* berikut ini:

“Sharian mereka dibekali pengenalan budaya Thailand, bahasa juga. Lebih seringnya pembekalan bersosial dan cara mengajar, micro teaching dibawah panduan DPL.”

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pembekalan dipandang sangat penting oleh seluruh PTAI yang menyelenggarakan KKN Internasional. Soewito (2013) dalam pengantarnya menyebutkan bahwa pembekalan KKN merupakan strategi pemberian pemahaman kepada mahasiswa tentang KKN sebelum mereka diterjunkan di lapangan (sekolah, lembaga, atau klub). Beliau menambahkan bahwa dengan pemahaman yang baik, diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmunya (yang diperoleh selama kuliah dan pembekalan) ke sasaran KKN. Selain itu, mahasiswa dapat memahami betul mekanisme pelaksanaan KKN. Selanjutnya mahasiswa dapat melaksanakan KKN dengan benar dari tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan KKN Internasional.

Data angket lainnya terkait pembekalan ini yaitu tentang manfaat yang diperoleh dari pembekalan. Menurut data yang diperoleh melalui Angket, seluruh peserta KKN Internasional

merasakan manfaat dengan adanya pembekalan. Manfaat yang diperoleh dibagi menjadi manfaat praktis dan psikologis (Brown, 2012; Bukaliya, 2012). Manfaat praktis yaitu manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh mahasiswa tetapi juga oleh Prodi, Fakultas, KUI, dan Universitas.

Data angket menunjukkan bahwa secara praktis pembekalan dapat menjadi acuan atau referensi ketika mengabdikan diri di negara tujuan dalam bentuk pengajaran di sekolah-sekolah, pengajian dengan warga, dan kegiatan sosial lainnya. Manfaat lainnya mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan yang akan terjadi selama KKN Internasional berlangsung. Berikut ini ujaran hasil wawancara dengan salah satu peserta UMSU yang melaksanakan KKN Internasional.

“Pembekalan itu sesuatu banget. Jadi bisa ngerti budaya Thailand sebelum berangkat kesana. Kan dipandu dulu oleh teman-teman Thailand yang disini ketika pembekalan. Jadi lebih siap.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tahap pembekalan menjadi wajib adanya karena kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi para peserta KKN Internasional. Manfaat lain yang dialami peserta KKN Internasional yaitu manfaat penggunaan bahasa. Hal ini diungkapkan oleh peserta lainnya bahwa:

“Pembekalan bahasa Inggris dan Thailand sangat membantu saya yang dari jurusan keguruan pendidikan agama islam

yang sedikit pasif dalam berbahasa Inggris bahkan tidak bisa berbahasa Melayu. Namun dengan pembekalan Bahasa yang diberikan oleh mahasiswa Thailand melalui panitia, alhamdulillah sangat membantu dalam berkomunikasi.”

Hasil wawancara di atas secara implisit menunjukkan bahwa terdapat nilai positif dengan adanya pembekalan karena pada dasarnya kemampuan berbahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat untuk diterima menjadi peserta KKN Internasional. Manfaat lainnya yaitu berkaitan dengan pembekalan budaya. Manfaat ini dirasakan oleh salahsatu peserta yang mengatakan bahwa:

“Jadi tahu budaya di Pattani melalui pembekalan yang menghadirkan mahasiswa Pattani di sini. Setidaknya dapat mengerti seperti apa dalam bertutur dan bersikap dengan masyarakat di Pattani.”

Selain itu, pembekalan juga dilakukan dengan tujuan untuk, seperti diungkapkan oleh beberapa *stakeholder*, yaitu:

“Memahami dan mengahayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi KKN Internasional; memiliki bekal pengetahuan Budaya lokal yang ada di negara tujuan; memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di sekolah/lembaga; memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan; memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah/lembaga; memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

89

bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di sekolah/lembaga; memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efektif dan efisien pada saat melaksanakan program KKN Internasional.”

Tujuan pembekalan KKN Internasional di atas yang merupakan gabungan dari keempat Responden tampak sangat ideal, padat dan lengkap. Sehingga, apabila tujuan-tujuan di atas tidak ditunjang oleh materi pembekalan yang ideal, padat, dan lengkap, dikhawatirkan para peserta mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya *shock and conflict culture* dan lemahnya kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi. Oleh karena itu pemilihan materi pembekalan yang baik ditengarai dapat menunjang ketercapaian tujuan-tujuan pembekalan di atas.

Materi pembekalan yang disajikan dalam pembekalan oleh masing-masing universitas penyelenggara KKN Internasional memiliki kesamaan. Menurut hasil wawancara dengan para stakeholder dari keempat universitas yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa materi pembekalan yang mereka siapkan meliputi pengembangan wawasan mahasiswa (Desmita, 2009), pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru bidang pendidikan, dan materi yang terkait dengan teknis KKN, seperti kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan bersosialisasi (Churchley, 2006), kemampuan beradaptasi (Cox, 2016), ilmu pengelolaan dan pengembangan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

90

lembaga pendidikan (Corey, 1997), kemampuan bersikap dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner (Chen and Chen, 2012), dan kemampuan “memanage waktu yang efektif dan efisien” pada saat melaksanakan program KKN Internasional (Fuller and Schoemberger, 1991).

Akan tetapi, dari sekian banyak kesamaan materi pembekalan, ada satu hal yang membedakan. Misalnya UMY memberikan pembekalan untuk menerbitkan SKPI (Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah). Berikut ini hasil wawancara dengan pihak LP3M UMY.

“...Tapi kita punya pembekalan umum namanya Tehnik Fasilitasi, itu semacam SKPI yah. Jadi semacam ini ijazah prasyarat skripsi pak, nah dan ijazah ini atau sertifikat ini berlaku tidak hanya di UMY, jadi kemampuan mahasiswa UMY untuk melakukan pemberdayaan.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setelah para peserta diberi bekal atau materi untuk melakukan KKN Internasional, mereka akan diberi SKPI sebagai bukti bahwa mereka layak melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, para peserta juga diberi materi tentang konsep dan filosofi pemberdayaan masyarakat dan perencanaan program dan monitoring evaluasi kegiatan. Berikut lanjutan dari hasil wawancara dengan pihak UMY:

“Materi pelatihan itu kalau yang tadi pak yang standar itu tadi ada 3, pertama terkait dengan konsep dan filosofi



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

91

pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu masuk ke teknik fasilitasi, teknik pendampingan lah teknik advokasi kaya gitu. Nah kemudian yang paling teknis itu yang ketiga membuat perencanaan program dan monitoring evaluasi kegiatan. Itu kita buat template dan alurnya.”

4.2.1.9 Pengantaran ke Negara Tujuan

Proses akhir dari tahap pra-pelaksanaan KKN Internasional yaitu pengantaran ke negara tujuan. Prosesi pengantaran peserta KKN diawali dengan pelepasan oleh jajaran rektorat, dekanat, dan *stakeholder* Kantor Urusan Internasional. Menurut informasi yang diperoleh dari para *stakeholder* ke empat universitas, pelepasan peserta dan DPL KKN Internasional dilaksanakan sehari sebelum keberangkatan ke negara tujuan.

“Keberangkatan 31 Juli, Tanggal 30nya diadakan pelepasan dulu oleh rektor, dekan, dan ketua LP2M. Semua DPL dan peserta disatukan di aula, Pak.”

Pelepasan tampaknya dapat dikatakan sebagai bentuk ceremonial formal terhadap suatu kegiatan dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi. Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada para peserta KKN Internasional melalui wawancara.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

92

“Iya Pak, kami dikumpulkan untuk prosesi pelepasan oleh Pak Rektor.”

Setibanya di negara tujuan, para peserta KKN Internasional disambut dengan baik oleh konsulat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, tokoh pemuda, dan masyarakat. Penyambutan ini lebih mudah dikenal dengan istilah serah terima peserta KKN Internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serah terima mengandung arti penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima.

DPL menyerahkan sejumlah mahasiswa atau peserta sesuai dengan daftar nama yang telah disediakan oleh universitas. Berikut paparan dai salahsatu *stakeholder* KUI UMSU:

“Karena masih ada kendala dengan budgeting, jadi yang ngantar dan menyerahkan mahasiswa ya kami dan DPL. Ceremonialnya kami menyerahkan map berisi daftar nama peserta KKN Thailand yang diterima pada waktu itu oleh konsulat.”

Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa telah terjadi proses serah terima peserta KKN antara pihak universitas dengan pihak yang memiliki otoritas di negara tujuan. Selanjutnya para peserta diantar hingga ke tempat penginapan yang sudah disediakan oleh negara tujuan. Untuk diketahui bahwa salahsatu isi dari MoU antara universitas yang terlibat dalam penelitian ini yaitu ketersediaan akomodasi dan makan pada hari kerja. Dengan



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

93

kata lain, para peserta sudah tidak perlu lagi membayar biaya sewa rumah atau penginapan di negara tujuan. Bahkan, mereka juga tidak perlu membeli makan mulai hari senin hingga sabtu kecuali hari minggu. Beberapa peserta KKN Thailand mengutarakan pengalaman yang sama terkait hal ini bahwa:

“Penginapan sih alhamdulillah gratis walaupun tinggalnya di sekitar sekolah, makan juga dikasih. Tapi kalau hari minggu kita yang nyari makan sendiri, ya sambil jalan-jalan.”

Akan tetapi, satu universitas dengan universitas lainnya memiliki acara serah terima yang berbeda. Misalnya menurut Responden 3, upacara serah terima hanya dilakukan antara pihak rektorat dengan ketua lembaga pendidikan menengah yang ada di Thailand. Berikut pernyataan dari Responden 1:

“Acara dilanjutkan dengan penyerahan para peserta oleh Pak Rektor dan diterima oleh Ketua yayasan di Thailand.”

Di pihak lain, yaitu Responden 2 menceritakan pengalamannya saat diwawancara perihal upacara serah terima peserta KKN. Responden 2 bercerita bahwa:

“Upacara serah termanya berlangsung dengan sangat meriah. Pak Rektor, Wakil Rektor Kerjasama, Pak Dekan, Pak Wadek, Dosen DPL, dan para peserta, kami semua disambut bak raja gitu hehehe solawat berkumandang.”

Tampak ada sedikit perbedaan dalam prosesi serah terima antara Responden 1, 2, 3, dan 4. Para *stakeholder* yang terlibat dalam penyambutan Responden 1 lebih formal dan istimewa mengingat prosedur yang ditempuh sejak awalpun berbeda. Ketika korespondensi, Responden 1 lebih birokrasi mulai dari atas ke bawah (*top down*), yaitu mulai dari Yang Dipertua dari Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Konsulat, Persatuan Alumni hingga Direktur Lembaga pendidikan Pertama dan Menengah. Tanpa bermaksud membandingkan antara kedua PTAI tersebut. Setidaknya dapat menjadi gambaran bagi PTAI lain perihal prosedur birokrasi yang seharusnya ditempuh agar konsekuensinya melebihi ekspektasi yang ada.

Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan para peserta KKN Internasional menunjukkan bahwa upacara serah terima peserta KKN Internasional sangat khidmat dilakukan. Bahkan, memberikan kesan positif bagi terciptanya hubungan akademik kearah yang saling menguntungkan satu sama lain (Mutovu, 2014). Narayanan dan Fukami (2010) mendukung pernyataan Mutovu bahwa kerjasama akademik yang terjalin antar universitas berpotensi terciptanya suasana akademik yang berkelanjutan. Seorang peserta KKN Internasional mengungkapkan bahwa:

“Mereka tampaknya mengaplikasikan hadis tentang sambutan terhadap tamu Pak. Kami diperlakukan seperti tamu agung. Disambut dengan marawis, solawatan, banyak

masyarakat setempat dan tempatnya seperti di lapangan luas.”

Prosesi serah terima ini berlangsung setiap tahun selama pihak universitas terus mengirimkan peserta KKN Internasional. Kemeriahan serah terima di awal ini sama semaraknya dengan pelepasan peserta KKN Internasional di akhir acara. Hal ini diakui oleh para *stakeholder* dan seluruh peserta KKN Internasional.

4.3 Pelaksanaan KKN Internasional

Pelaksanaan KKN Internasional diawali dengan acara serah-terima peserta KKN dari pihak universitas ke pihak masyarakat di negara tujuan. pelaksanaan dilanjutkan dengan penerapan beberapa siklus kegiatan yang secara keseluruhan mengadopsi *participatory action research* (PAR).

4.3.1 Serah-Terima Peserta KKN Internasional

Acara serah-terima ini merupakan acara lanjutan dari pemberangkatan peserta KKN Internasional ke Thailand. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serah terima mengandung arti penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima. Setelah tiba di tempat tujuan, peserta KKN, DPL, dan perwakilan dari rektorat atau dekanat atau Kantor Urusan Internasional bersiap diri untuk menghadiri acara serah-terima di tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

96

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PTAI menunjukkan bahwa salahsatu ritual yang kerap kali dilakukan dengan cara yang satu sama lain berbeda dari tahun ke tahun yaitu upacara serah-terima. Menurut Responden 1, upacara serah terima hanya dilakukan antara pihak rektorat dengan ketua lembaga pendidikan menengah yang ada di Thailand. Berikut pernyataan dari Responden 1:

“KKN pertama waktu itu diserahkan oleh Pak Rektor langsung didampingi Dekan, Ketua Prodi, saya dari KUI dan DPL dan diterima oleh Ketua yayasan di Thailand.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa DPL pada saat itu berperan tidak hanya sebagai pendamping para peserta tetapi juga pendamping *stakeholder*. Hal ini berbeda sekali dengan peran DPL dalam KKN regular yang diadakan di dalam negeri. Adapun peran Dekanat, dan kejurusan di dalam KKN regular mendampingi Rektorat melepas secara simbolik para peserta KKN Internasional.

Di pihak lain, yaitu Responden 2 menceritakan pengalamannya saat diwawancara perihal upacara serah-terima peserta KKN Internasional. Responden 2 bercerita bahwa:

“Kami dikumpulkan di lapangan terus ada solawatan. Pada sesi serah terima peserta, Warek Kerjasama yang menyerahkannya ke Ketua Yayasan.”

Satu hal yang sama dalam prosesi serah terima KKN Internasional yaitu keterlibatan orang-orang terpenting baik dari pihak penyerah (universitas) maupun dari pihak penerima (negara

tujuan). Dari pihak universitas, Rektor atau pejabat yang ditugasi menyerahkan peserta KKN yang diterima oleh yang Dipertua dari Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Persatuan Alumni hingga Direktur Lembaga pendidikan Pertama dan Menengah. Bahkan, menurut informasi yang diterima dari Responden 1, ketika prosesi serah terima, pihak penerimanya yaitu seluruh tingkat pemerintahan mulai dari Bupati hingga Tokoh masyarakat menyambut dengan baik kedatangan dari pihak universitas untuk melaksanakan KKN Internasional di negaranya.

Prosesi serah terima ini berlangsung setiap tahun selama pihak universitas terus mengirimkan peserta KKN Internasional. Kemeriahan serah terima di awal ini sama semaraknya dengan pelepasan peserta KKN Internasional di akhir acara. Hal ini diakui oleh para *stakeholder* dan seluruh peserta KKN Internasional.

Pelaksanaan KKN di Thailand dilaksanakan oleh seluruh universitas yang terlibat dalam penelitian ini untuk jangka waktu yang tidak sebentar, yaitu 30 hari. Selama 30 hari itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peserta KKN Internasional yang kemudian dikemas melalui Siklus-siklus kegiatan berikut ini.

4.3.1.1 Siklus 1

Tahapan pertama dalam pelaksanaan KKN Internasional setelah keberadaan para peserta diterima secara resmi oleh negara tujuan yaitu melakukan silaturahmi ke rumah-rumah warga atau

yang dipertuakan warga. Adapun tujuan dari silaturahmi ini yaitu, seperti yang diungkapkan oleh masing-masing *stakeholder* dari keempat universitas (responden) yang kemudian digabungkan sebagai berikut:

1) Terjalinnnya rasa kekeluargaan yang baik dengan masyarakat

Setibanya di penginapan yang disediakan oleh warga setempat, para peserta tidak tinggal diam, melainkan mereka langsung keliling bersilaturahmi ke rumah warga. Mereka memulai memperkenalkan diri dan berdiskusi terkait maksud dan tujuan keberadaan mereka di negara tujuan. Mereka mengharapkan dapat bekerjasama dengan para warga setempat. Oleh karena itu melalui silaturahmi inilah diharapkan beberapa informasi terkait masalah dan potensi dapat tergali.

2) Terklasifikasinya kelompok-kelompok masyarakat

Masih dalam proses silaturahmi, para peserta diharapkan bertanya tentang siapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh komunitas seni, dan sebagainya. Seluruh informasi yang diperoleh melalui kunjungan ke rumah warga ini ditulis dengan teliti untuk kemudian dicari permasalahan yang melekat pada kelompok masyarakat.

3) Mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat

Silaturahmi juga diwarnai dengan obrolan-obrolan dari ringan hingga ke (sebut saja) berat, yaitu ada permasalahan apa di masyarakat setempat. Diantara masalah yang teridentifikasi atau

terrekapitulasi, menurut hasil wawancara dengan peserta KKN Internasional tahun 2017, yaitu pendidikan, agama, keamanan, dan sosial.

4.3.1.2 Siklus 2

Siklus 2 ini merupakan siklus pemetaan komunitas (*community mapping*) yang merupakan suatu pendekatan atau cara untuk memperluas akses ke pengetahuan lokal. *Community map* merupakan visualisasi pengetahuan dan persepsi berbasis masyarakat mendorong pertukaran informasi dan menyetarakan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan mereka.

Proses pemetaan ini melibatkan beberapa pihak antara lain Organisasi masyarakat, asosiasi warga, organisasi karang taruna, dan pemerintahan lokal. Mereka ini kemudian diundang oleh para peserta KKN Internasional untuk berbagi kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok atau komunitas. Hal-hal yang dapat dipetakan saat kumpul dengan warga yaitu:

- 1) Keterampilan warga

Baik peserta KKN maupun warga akan sama-sama memahami apa yang bisa dilakukan dengan baik terkait masalah dan potensi sosial yang sedang dihadapi dengan cara menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk warga.

- 2) Keterampilan dan Pengetahuan Asosiasi Warga

Tiap organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok remaja mesjid, kelompok pemuda pemudi, kelompok ibu PKK, dan yang lainnya berkontribusi memberikan pelatihan atau penyuluhan bersama peserta KKN kepada warga.

3) Keterampilan dan Pengetahuan Institusi

Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas dapat membantu menjalankan pemetaan ini (Green and Lawrence, 2005). Sebagai contoh, komite sekolah, komite untuk pelayanan kesehatan, pelayanan air, atau pelayanan pertanian dapat memetakan tingkat kesejahteraan dan kesehatan warga.

Para peserta KKN mengundang mereka untuk hadir dalam prosesi pemetaan komunitas ini. Menurut hasil wawancara dengan peserta KKN Thailand dari Responden 2 menyebutkan bahwa:

“Warga diberi pengertian, tujuan serta manfaat dari pemetaan. Dijelaskan pula unsur-unsur yang harus ada dalam pembuatan peta wilayah melalui sumbang saran.”

Responden 4 melengkapi informasi terkait prosesi pemetaan komunitas ini. Salah satu peserta KKN Internasional tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Setelah hasil kesepakatan warga dengan kami terciptalah peta sosial dan lokasi. Kemudian kami lakukan review data sebagai triangulasi ketangguhan data pemetaan.”

4.3.1.3 Siklus 3

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Tahap perencanaan partisipatif diawali dengan kajian keadaan pedesaan secara partisipatif dan dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

Para peserta KKN Internasional dengan aktif menjalankan siklus 3 dengan mengutamakan penyusunan disain program. Hasil dari kumpulan dengan warga pada siklus sebelumnya

Dalam tahap inipun para peserta KKN disarankan untuk melakukan pengorganisasian masyarakat. Istilah pengorganisasian masyarakat mengandung pengertian yang luas dari kedua akar katanya. Istilah pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun atanan yang lebih adil. Maka pengorganisasian masyarakat bukanlah sekumpulan ‘resep’ atau ‘rumus ilmiah ajaib’—karena setiap masalah, isu atau keadaan di tengah dan oleh rakyat selalu mengandung pengertian khas sesuai dengan konteks sosial, budaya, politik, ekonomi yang juga khas pada kelompok masyarakat.

Mengorganisir rakyat sebenarnya merupakan akibat logis dari analisis tentang apa yang terjadi, yakni ketidakadilan dan penindasan di sekitar kita. Untuk menjawabnya, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa seseorang harus terlibat ke dalam kehidupan rakyat yang bersangkutan, dengan keterlibatannya maka pengorganisasian mereka pun dapat dimulai. Menurut Mahmudi (2010), keterlibatan seseorang dalam proses-proses berbagai kegiatan yang berlangsung menentang ketidakadilan dan bertujuan menghapus ketidakadilan dan penindasan—mereka inilah yang sering disebut *Community Organizer (CO)*.

Lebih jauh, Mahmudi (2010) memaparkan beberapa tujuan pengorganisasian masyarakat, diantaranya:

1. Pemberdayaan masyarakat

Melalui proses pengorganisasian masyarakat, rakyat akan belajar bagaimana mengatasi ketidakberdayaan sekaligus mengembangkan kapasitasnya.

2. Pembangunan struktur dan organisasi masyarakat yang kuat
Tujuan berikutnya yaitu membangun dan memelihara struktur organisasi yang paling tepat, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan dan aspirasi mereka.

3. Peningkatan kualitas hidup

Pengorganisasian masyarakat juga menjadi jalan untuk menjamin peningkatan kualitas hidup rakyat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, proses-proses

mobilisasi harus bisa memberikan kesempatan kepada rakyat agar terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan

Untuk jangka panjang, harus dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan SDM dan solidaritas melalui distribusi antara kekuasaan dan sumber daya masyarakat dampingan yang seimbang (Pianko, 1996), sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan hak dasarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengorganisasian masyarakat diperlukan adanya etos dan komitmen organizer. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua kelompok KKN Internasional bahwa:

“Kita diperankan sebagai community organizer yang berarti terlibat dalam suatu proses kearah perubahan sosial yang lebih besar. Untuk itu diperlukan etos kerja dan tanggungjawab yang ekstra.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa etos dan komitmen seorang *community organizer* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menghadapi banyak tantangan dan berhasil membawa perubahan bersama masyarakat (Weiner, 2009).

Sedangkan responden 2 menyebutkan bahwa dalam menjalankan pengorganisasian masyarakat diperlukan kemandirian. Lebih jelasnya berikut paparan dari responden 2:

“Andal mengandalkan yang dikhawatirkan, masyarakat harus mampu mengorganisir diri mereka sendiri setelah difasilitasi.”

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa kemandirian merupakan prinsip yang dipegang baik dalam sikap politik, budaya, maupun dalam memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang ada. Seorang CO hanya akan dianggap selesai dan berhasil melakukan pekerjaannya jika masyarakat yang diorganisir telah mampu mengorganisir diri mereka sendiri (*local leader*).

Responden 3 juga memiliki prinsip yang berbeda dalam menjalankan pengorganisasian masyarakat yaitu partisipasi. Berikut hasil wawancaranya:

“Walaupun kita COnya tapi masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses pengorganisasian mereka sendiri.”

Singkat kata, seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini telah berupaya menjalankan program pengorganisasian semaksimal mungkin dengan cara yang beragam dari satu responden ke responden lainnya.

4.3.2 Pasca-Pelaksanaan KKN Internasional

Kegiatan yang dilakukan oleh para responden yang terlibat dalam penelitian ini ketika pelaksanaan KKN Internasional dilaksanakan yaitu membuat laporan. Siapa saja yang perlu membuat laporan? Seluruh partisipan memberikan jawaban secara

berbeda-beda, namun setelah kami himpun, mereka yang harus membuat laporan meliputi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa peserta KKN Internasional. Berikut adalah analisis terhadap hasil wawancara dan angket dari para responden.

Stakeholder dari UMSU, UMY dan UMP misalnya mengatakan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa setelah selesai melakukan KKN Internasional yaitu laporan akademik bagi lokasi KKN Internasional (tertulis) dan laporan presentasi (lisan). Sedangkan UINSA mengharuskan peserta KKN Internasional membuat laporan mingguan dari minggu pertama sampai minggu ketiga, laporan akhir, dan laporan presentasi. Selain itu, UINSA mengharuskan DPL untuk membuat laporan hasil pendampingan lapangan.

4.3.2.1 Laporan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Internasional

Tugas utama dari DPL adalah mendampingi kegiatan mahasiswa saat melakukan kunjungan. DPL pada umumnya melakukan 3 kali kunjungan, yaitu di awal saat serah terima mahasiswa peserta KKN Internasional, pertengahan, dan di akhir saat kepulangan dari Thailand. Dengan demikian, untuk setiap kali kunjungan, DPL diwajibkan membuat laporan hasil pendampingan lapangan setiap kali melakukan kunjungan dengan mengisi formulir yang disediakan LPPM.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

106

Isi laporan kunjungan pertama pada umumnya terkait dengan lokasi KKN Internasional, pejabat penerima mahasiswa, sikap masyarakat setempat, program yang akan dijalankan mahasiswa, dan sekaligus membahas rencana rebug warga untuk mengidentifikasi masalah dan potensi di lokasi KKN Internasional.

Isi laporan kunjungan kedua yaitu progress kegiatan mahasiswa pada minggu pertama dan menjelang kedua, permasalahan yang dihadapi mahasiswa, solusi yang disarankan ke mahasiswa, mengunjungi tempat-tempat yang merupakan bagian dari program KKN Internasional, dan masukan-masukan dari masyarakat setempat.

Sedangkan isi laporan kunjungan minggu terakhir yaitu melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh peserta KKN Internasional, testimoni pejabat dan masyarakat setempat terhadap kegiatan KKN Internasional, pelepasan peserta KKN dari pejabat dan masyarakat lokasi setempat, dan melaporkan masukan saran dan kritik dari masyarakat.

4.3.2.2 Laporan Mahasiswa Peserta KKN Internasional

Laporan yang harus dibuat oleh mahasiswa peserta KKN Internasional terhadap pelaksanaan kinerjanya meliputi laporan mingguan, laporan akhir, dan laporan presentasi.

1) Laporan Mingguan

Untuk monitoring KKN Internasional di Thailand, setiap kelompok diwajibkan membuat laporan mingguan (minggu pertama dan kedua). Laporan mingguan berbentuk, mengutip istilah yang digunakan oleh White (2001) yaitu '*fieldnote*', hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaan program KKN Internasional dan kertas kerja lain (hasil rebug warga dengan komunitas seperti peta, diagram, matrix) sehingga dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan KKN Internasional dilakukan.

Laporan mingguan lainnya yaitu rencana program pemecahan masalah dalam bentuk narasi program yang akan dilaksanakan dengan komunitas. Narasi program tersebut bentuknya berupa proposal yang sistimatikanya sesuai dengan *logical framework approach* (LFA) yang diajukan oleh Kimberly dan Cotesta (1998). Laporan mingguan keempat adalah hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa bersama komunitas, serta hasil-hasil proses yang akan menjadi dasar refleksi dan teorisasi, sekaligus rancangan laporan akhir program KKN Internasional.

2) Laporan Akhir

Laporan akhir KKN Internasional ini dibuat oleh kelompok peserta KKN di lokasi mereka bertugas. Laporan akhir ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu laporan akademik, laporan executive summary, dan film dokumenter atau Photo Flash.

a) Laporan Akademik

Menurut hasil wawancara dengan stakeholder UINSA, laporan akademik ini berupa narasi riset aksi. Informasi lengkap terkait ini disajikan dalam buku panduan KKN Internasional yang kemudian dikutip untuk dilaporkan dalam penelitian ini. Model laporan ini merupakan narasi reflektif dari hasil semua proses KKN internasional. Laporan ini merupakan laporan akademik dari sebuah teoritisasi tiga pilar yaitu penelitian, pembelajaran, dan pemecahan teknis. Oleh sebab itu, *field note* dari setiap proses yang dilaksanakan merupakan bagian terpenting yang tidak boleh dilewatkan oleh mahasiswa peserta KKN Internasional. Hal ini karena semua hasil catatan lapangan menjadi landasan dasar analisis yang terkait dengan kondisi riil dari komunitas. Yakni bagaimana relasi sosial, relasi kuasa, dan potensi masyarakat.

Selanjutnya catatan juga menjadi landasan analisis setiap proses yang terjadi, dari tahap awal hingga akhir proses, apakah terjadi pembelajaran. Adakah terjadi perubahan cara berfikir masyarakat, sejauhmana perubahan itu terjadi, mengapa berubah, siapa-siapa motor penggerak, mengapa ia menjadi motor penggerak, dan bagaimana koordinasi dilakukan selama ini. Dari catatan proses juga diketahui sejauhmana keberhasilan mahasiswa membangun pranata sosial, baik kelembagaan masyarakat maupun cara hidup mereka.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

109

Laporan ini karena bersifat akademik, maka pihak UINSA menyusun organisasi penulisan sebagaimana struktur karya ilmiah akademik, yaitu bab perbab. Namun sifatnya tidak terlalu kaku seperti karya ilmiah akademik selama ini. Secara garis besar bab perbab disajikan berikut ini:

Bab 1: merupakan pendahuluan yang berisi tentang analisis situasi kehidupan masyarakat di negara tujuan KKN. Penyajiannya dimulai dari aspek geografis, demografis, pendidikan, keberagaman, tradisi atau kebudayaan, kesehatan, perekonomian, dan politik pembangunan pemerintahan dan pendidikan. Bab 2: merupakan analisis hasil riset, yaitu temuan-temuan problem. Isi bab ini merupakan uraian analisis problem-problem temuan riset dan rebug warga bersama masyarakat. Oleh karena itu, uraiannya akan kelihatan data-data kualitatif maupun kuantitatif pendukung atau argumentasi problem tersebut. Demikian pula akan nampak beberapa analisis problem dalam bentuk diagram, bagan maupun matrik sebagai pendukung uraian analisis problem yang terjadi.

Bab 3: merupakan narasi deskripsi proses pendampingan dalam perencanaan pemecahan masalah dan analisis potensi masyarakat. Sofyan (2010) menyebutkan bahwa pendampingan diperlukan untuk membantu arah narasi atau tulisan akademik. Isi bab ini merupakan narasi deskripsi hasil catatan-catatan kegiatan perencanaan pemecahan masalah dan analisis potensi sumberdaya



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

110

masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk didokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk catatan lapangan, maupun gambar proses diskusi.

Bab 4: merupakan narasi deskripsi proses aksi atau implementasi kegiatan, sebagaimana perencanaan yang diuraikan pada Bab 3. Isi harus mencerminkan gambaran proses kegiatan yang menunjukkan program pemecahan masalah. Oleh karena itu *field note* dan rekam gambar merupakan hal yang sangat penting.

Bab 5: merupakan analisis refleksi hasil proses pelaksanaan KKN Internasional. Analisis refleksi ini menguraikan bagaimana perubahan terjadi. Bukti-bukti gambaran keberhasilan program diuraikan dalam bentuk bukti pranata sosial yang muncul, adanya *local leader* sebagai penggerak, dan adanya komitmen masyarakat untuk menindaklanjuti program-program ini. Alur perubahan ini dari awal sampai akhir merupakan sebuah teori baru dalam perubahan sosial.

Bab 6: merupakan kesimpulan akhir, yakni ringkasan problem masyarakat yang terjadi dan rekomendasi untuk kelanjutan program. Dalam laporan ini perlu dilengkapi dengan beberapa lampiran pendahulu dan lampiran penutup. Lampiran pendahulu meliputi halaman judul, halaman pengesahan DPL dan LP2M, kata pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Bagan, dan Daftar Istilah. Adapun lampiran penutup terdiri dari Daftar



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

III

Pustaka, Daftar Riwayat Hidup dan Pengalaman Peserta KKN Internasional.

b) Laporan Executive Summary

Laporan jenis ini merupakan ringkasan dari laporan akademik yang siap dipublikasikan di jurnal ilmiah. Laporan ini sebagai salah satu usaha untuk mempublikasikan hasil KKN Internasional sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

“a) memenuhi standar penulisan jurnal ilmiah; b) mencantumkan abstrak berbahasa inggris; c) mencantumkan kata kunci; d) laporan terdiri dari 20-25 halaman, 1.5 spasi; e) mencantumkan referensi sebagai rujukan dalam bentuk *footnote* dan daftar pustaka; dan f) mencantumkan teorisasi dari hasil KKN Internasional.”

Dalam hal penulisan laporan executive summary ini, DPL difungsikan sebagai pembimbing DPL sekaligus pembimbing penulisan laporan executive agar layak publish di jurnal. Laporan ini mengharuskan peserta KKN Internasional menjilidnya dalam bentuk yang sama dengan laporan akademik, tetapi tanpa pengesahan dan daftar isi. Proses publikasi biasanya dibantu oleh LP2M yang oleh karena itu peserta KKN Internasional harus mengirimkan soft copynya.

c) Laporan Presentasi

Laporan untuk presentasi ini dibuat dalam berbagai bentuk. Bergantung pada kemampuan mahasiswa dan kemauan mahasiswa untuk membuatnya. Laporan ini menurut stakeholder LPM UINSA harus disiapkan sejak awal karena memang laporan ini merupakan gambar atau film yang harus direkam sejak awal proses KKN Internasional berlangsung.

Disain laporan ini tematik yang mengangkat satu persoalan yang terjadi dan proses pendampingannya sekaligus hasil perubahan sosial yang terjadi. Prosesnya yaitu menyusun terlebih dahulu skenario film yang sesuai dengan tema persoalan dan hasil pendampingannya sesuai dengan laporan akademik, baru dipadu dengan dokumentasi foto atau film yang dimiliki dari proses lapangan.

Laporan jenis ini pun dilakukan oleh UMSU yang pelaksanaannya berbeda dengan UINSA. Pihak UMSU menyebutkan bahwa laporan presentasi ini mengharuskan ketua kelompok atau seseorang yang dianggap mampu dari kelompok tersebut melaporkan secara lisan dalam bentuk presentasi di depan LP2M dan dosen-dosen kegiatan atau capaian-capaian yang sudah dilakukan selama KKN Internasional.

Bahkan, peserta KKN Internasional pun harus mampu mempresentasikan pengalamannya di depan mahasiswa baru ketika acara orientasi mahasiswa dan mahasiswa semester 5 atau



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

113

6 yang akan menjalani KKN pada semester 7. Pada saat orientasi, presentasi dilakukan untuk menunjukkan bahwa mahasiswa UMSU berkesempatan menginjakkan kaki di luar negeri melalui salahsatunya program KKN Internasional. Sedangkan presentasi pada semester 5 atau 6 dimaksudkan agar para mahasiswa yang tertarik untuk KKN ke luar negeri dapat memperoleh gambaran dan memetik pengalaman kakak tingkatnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengangkat tiga isu utama sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan penelitian ini: (1) menggambarkan KKN Internasional yang dilaksanakan selama ini; (2) menggambarkan keefektifan pelaksanaan KKN Internasional dilihat dari respons *stake holder* maupun *user*.; dan, (3) rumusan model KKN Internasional untuk calon guru di PTAI. Rumusan kesimpulan berikut disajikan setelah data diolah dan dianalisa.

Pertama, KKN internasional yang diselenggarakan selama ini mempunyai perbedaan dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lainnya. Perbedaan terletak pada beberapa hal, antara lain: lamanya waktu pelaksanaan, sumber pembiayaan, keterlibatan pihak pimpinan, peserta, materi pelatihan, pengelola kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Namun demikian, ada beberapa persamaan di antara kedua lembaga perguruan tinggi tersebut; masing-masing menjadi negara ASEAN sebagai negara tujuan utama, yakni negara Thailand, khususnya tiga provinsi Thailand Selatan seperti: Pattani, Narawita, dan Yala. Pertimbangan utama memilih tiga provinsi tersebut adalah karena kedekatan budaya, agama, dan keberadaan mahasiswa dari negara tersebut untuk menjadi fasilitator dalam program tersebut.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

115

Kedua, KKN Internasional merupakan program yang penting, oleh karenanya; merasa perlu bahkan sangat perlu untuk dilakukan. Indikator bahwa program ini perlu bisa dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh keempat PT tersebut, antara lain: (a) Mengupayakan berbagai cara agar program ini terus berlangsung. (b) Pembuatan dokumen kerjasama (MoU), dan (c) Penganggaran Secara Resmi untuk Kegiatan KKN Internasional. Mengingat kenyataan tersebut dipandang untuk merumuskan model KKN Internasional yang efektif untuk mahasiswa calon guru di PTAI.

Ketiga, model KKN Internasional untuk calon guru di PTAI yang berdasarkan analisa kebutuhan dilapangan memiliki karakteritik unik: (a) berlangsung 1 -2 bulan, (b) negara ASEAN sebagai negara tujuan utama, (c) KKN internasional adalah negara-negara ASEAN; (2) besaran biaya 4 -5 juta yang sebagiannya disubsidi oleh perguruan tinggi penyelenggara, (c) frekuensi monitoring sebanyak 1 -2 kali selama kegiatan, di luar penutupan dan pembukaan, (d) peserta yang bervariasi dari berbagai jurusan/program studi, dengan prioritas pada mahasiswa calon guru, (e) keterlibatan berbagai pihak, (f) persiapan yang memadai yang dikelola oleh tim khusus, dan (g) materi kegiatan yang memberdayakan.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

116

Penelitian merekomendasikan bahwa KKN internasional dikelola lebih baik dengan melakukan hal-hal berikut: (a) melakukan analisa kebutuhan lapangan untuk merumuskan tujuan/target yang jelas, (b) melakukan persiapan yang matang, (c) melakukan evaluasi atau refleksi pada saat pra kegiatan, kegiatan utama, dan pasca kegiatan KKN Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Kesiapan Lulusan Sekolah Pendidikan Guru dalam mengajarkan Matematika dan IPA di SD, Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana IKIP Jakarta.
- Astuti, N.W.W., Suhandana, I.G.A. dan Dantes, N. 2012. Evaluasi efektivitas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN) mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali. *E-journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(4), 1-12.
- Baker-Boosamra, M. (2006). SPNA Review From Service to Solidarity: Evaluation and Recommendations for International Service Learning. Retrieved from <http://scholarworks.gvsu.edu/spnareview>
- Bandits, N. 2014. *Manajemen Perusahaan Seleksi SDM*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Batool, Z., Ellahi, N., and Masood, A. 2012. National internship programme and its evaluation: A case study of Punjab region. *Academic Research International*, 2(2), 256-570.
- Berasategi, N., Alonso, I., & Roman, G. (2016). Service-learning and Higher Education: Evaluating Students Learning Process form their Own Percpective. *Procedia - Social*

and Behavioral Sciences, 228, 424-429.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.065>

Borg, W.R and Gall, M.D. (1979). *Educational Research An Introduction*. NweYork : Longman.

Brook dan Emmert. 1989. *The Psychology of Adolescence*. Third Edition. New Jersey : MacMilland Publishing. Co. Inc.

Brown, D. 2012. Urban Teachers' Professed Calsroom Management Strategies. *Urban Education*, Vol. 39(3), 266-289.

Bukaliya, R. 2012. The potential benefits and challenges of internship programmes in an ODL institution: A case for the Zimbabwe open university. *Inernational Journal on New Trends in Education*, 3(1), 118-133.

Cahyati, A.A. 2014. *Pengaruh Mata Kuliah Micro Teaching dan KKN terhadap Tingkat Kematangan Calon Guru pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi Angkatan 2010 Unmuh Surakarta*. Sebuah Skripsi. Surakarta: Unmuh Surakarta.

Chen, H., Wang, C., and Chen, C.F. 2011. A study if the effects of internship experiences on the behavioral intentions of colleges students majoring in leisure management in Taiwan. *Jornal of Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism Education*, 10(2), 61-73.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

119

- Churchley, C.M. 2006. Collaborative Consultation in the Context of Inclusion. *International Congress Series*, 1283, 122-126.
- Coper, J. and Weber. 1996. *Classroom teaching skill. A handbook*, USA. University of Houston.
- Corey, R. 1997. *Technology fountainheads: The Management challenge of R&D consortia*. Boston, M.A: Harvard Business School Press.
- Cox, J. 2016. How to make learning fun. Diperoleh 01 Nopember 2017 dari <https://www.thoughtco.com/how-to-make-learning-fun-2081740>
- Desmita. 2009. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuller, R., and Schoenberger, R. 1991. The gender salary gap: Do academic achievement, internship experience and college major make a difference? *Social Science Quarterly*, 10: 395-427.
- Green, W, and Lawrence. 2005. *Health Education Planning A Diagnostic Approach*. The Johns Hopkins University: Mayfield Publishing Company.
- Hanifah, H. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

Hornby, A.S. 2002. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. New York: Oxford University Press.

Kapterev, A., 2011. *Presentation secrets*. Australia: John Wiley and Sons.

Kimberly, N., and Cotesta, P. 1998. *Students' Manual: How to Produce Quality Work and Get It Done on Time*. Monash University, Australia: Faculty of Business and Economics.

Lange, G. W., & Adler, F. 2012. Motivation and achievement in elementary children. *Journal of Educational Psychology*, 75, 848-856.

Linse, C.T. 2005. *Practical English Language Teaching*. New York: McGraw-Hill.

Musa, Muhammad, 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Fajar Agung.

Mutovu, Musa. 2014. A Structural Equation Modelling of the Academic Self-Concept Scale. *International Electronic Journal of Elementary Education* Vol.6, Issue 2, 185-198.

Niblett, B. (2010). The Unheard Voices : *Journal of Experiential Education*, 33(3), 290-292.

Narayanan, V.K., Olk, P.M. and Fukami, C.V. 2010. Determinants of internship effectiveness: An exploratory model. *Academy of Management Learning and Education*, 9(1), 61-80.

Nidno. 2013. *Seleksi Tenaga Kerja*. Jakarta: Pustaka Banaman Precindo.

Pathel, N.H. 2015. *Undergraduate internship program structures for effective postgraduation employability: A case study of a Mass Media Arts internship program*. Electronic Theses and Dissertations Collection for Atlanta University and Clark Atlanta University. New York: New York Institute of Technology.

Paulson, S.K., and Baker, H.E. 1999. An experimental approach to facilitate anticipatory socialization. *The International Journal of Organizational Analysis*. 7: 365-378.

Pechak, C. M., & Thompson, M. (2009). A Conceptual Model of Optimal International Service-Learning and Its Application to Global Health Initiatives in Rehabilitation. *Physical Therapy*, 89(11), 1192-1204.

<https://doi.org/10.2522/ptj.20080378>

Phoebe, W.K. 2010. *Determinants of internship effectiveness for university students in Hong Kong*. Unpublished Dissertation. Hong Kong: Hong Kong Baptist University.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

122

Pianko, D. 1996. Power internships. *Management Review*, 85(12), 31-33.

Purwati, L. 2015. *The Influence of Practical Field Experience and Academic Self-Concept to the Student Readiness to Become a Teacher*. Unpublished Paper. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Rae, L., 2005. *Menggunakan teknik presentasi dalam pelatihan dan pengembangan*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta (edisi bahasa Indonesia).

Salim H.S. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*. Jakarta: Sinar Grafika

Septian, h. 2015. *MSDM Pengujian Seleksi Kelas Karyawan*. Jakarta: Sinar Grafika

Soewito, N. 2013. *Materi Pembekalan KKN*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

Sofyan S. Willis. 2010. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabet.

Tampubolon, P. D., 2001. *Perguruan Tinggi Bermutu "Paradigma Baru Manajemen Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke 21"*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

123

Timmreck. 2001. *Managing Motivation and Developing Job Satisfaction in the Health Care Work Environment* California: State University San Bernardino.

Usman, N. 2002. *Konteks Berbasis Implementasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Weiner, B.J. 2009. *A Theory of Organizational Readiness to Change*. Newbury Park, Calif.: Sage Publicat.

White, N. 2001. *Kaplan Writing Power*. New York: Simon and Schuster.

BIODATA PENULIS



SAJIDIN dilahirkan di Panawuan, Tarogong - Garut pada 04 Maret 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah dihabiskan di tempat kelahirannya. Melanjutkan ke jenjang S1 di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, UIN (dulu IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 1992) dan S1 Program khusus di Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Indonesia (lulus 1998). Melanjutkan S2 Program Pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Setelah lulus pada tahun 2005, penulis melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan lulus meraih gelar Doktor pada bidang pendidikan bahasa Inggris pada 2015. Penulis yang sekarang menjabat sebagai ketua Program Studi Pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung . pernah mengajar di beberapa universitas swasta, antara lain: STAIDA Garut, STKIP Garut, dan Universitas Terbuka, Bandung. Selain aktif dalam pelatihan guru dan pustakawan,



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

125

penulis aktif dalam kegiatan seminar nasional dan internasional. Beberapa shortcourse dan seminar yang pernah diikutinya, antara lain: Doctoral Sandwich Program di Ohio USA, dan CamTESOL di Pnompenh, Kamboja., dan OHIO Tesol Conference di Colombus, Ohio, USA.

KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

126



ANDANG SAEHU lahir di

Bayongbong Garut tanggal 15 Juli 1979. Riwayat pendidikannya dimulai dari daerah Kecamatan Bayongbong, yaitu SDN Nanjung, Bayongbong lulus tahun 1992 dan SMPN 2 Bayongbong lulus tahun 1995. Mulai tahun 1995 hingga 1998, beliau habiskan masa studi di MAN 1 Garut. Gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris

diraihnya pada bulan Februari 2003 dari Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam upaya mengembangkan keilmuannya, gelar Magister Pendidikan diraihnya pada bulan Juni 2008 dari Universitas Pendidikan Indonesia pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selang dua tahun dari jenjang S2nya, pada bulan Agustus 2010 beliau memperoleh Basiswa Studi dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studi S3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Univesitas Negeri Malang (UM) dan lulus pada akhir 2014.

Berbagai kegiatan akademik yang berkaitan dengan penerjemahan pernah diikutinya sebagai pembicara, partisipan, dan penerjemah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan yang bersangkutan merupakan anggota (*junior member*)



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

127

Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) sejak tahun 2013 yang berencana upgrade keanggotaannya (*full member*) dan telah beberapa kali terlibat dalam kegiatan hpi, seperti *workshop on simultaneous interpreting, consecutive interpreting, legal document translation*, dsb. Selama masa studi S2 dan S3 hingga sekarang, beliau seringkali memenuhi permintaan klien sebagai *freelance translator* dan *freelance interpreter*.

Saat ini, beliau dipercaya mengampu matakuliah *translation* dan *interpreting* di Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris (S1) dan Program Studi Bahasa Inggris (D3) Fakultas Adab dan Humaniora, di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Islam Nusantara.

KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

128



ASEP SULAEMAN lahir di Garut pada tgl 1 April 1967. Riwayat pendidikan menyelesaikan pendidikan MI Al Musthafa Bayongbobg Garut, lulus tahun 1980, MTs Attarbiyah Bayongbong Garut tahun 1985, PGAN Garut tahun 1988, S1 PAI tahun

1994, S2 PLS UPI tahun 2003 dan S3 UPI tahun 2010.

Karya Ilmiah:

1. Kecerdasan Intelektual dan spiritual dalam Perspektif Islam. Haruan pos Garut 2008.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Civic Education) Buku Daras. Penerbit Arfino Raya 2012
3. Pengembangan Model Pendidikan Keterampilan Berbasis Masyarakat bagi Santri di Pontren Darussalam Garut
4. Pelatihan keluarga sakinah di lembaga pengkajian penegakan dan penerapan syariat Islam kab garut.
5. Mengenal Filsafat Islam. Buku Daras. Penerbit Yrama widya 2016.
6. Akulturasi budaya Islam dan tradisi lokal pada nama bangunan dan tradisi ritual di kraton Yogyakarta 2016



KKN INTERNASIONAL di Perguruan Tinggi Agama Islam

129

7. Model pengembangan PPL internasional untuk mahasiswa calon guru di PTAI 2017